



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Dela Dwiazhari
165020107111017

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di
Provinsi Jawa Timur"

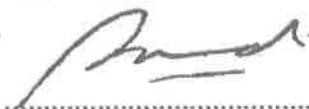
Yang disusun oleh :

Nama : Dela Dwiazhari
NIM : 165020107111017
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Program Studi : S1 Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **24 Juli 2020** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Atu Bagus Wiguna, S.E., M.E.
NIP. 2016079101181001
(Dosen Pembimbing)
2. Dwi Budi Santoso, SE., MS., Ph.D
NIP. 196203151987011001
(Dosen Penguji I)
3. Dr. Susilo, SE., MS.
NIP. 196010301986011001
(Dosen Penguji II)



Malang, 24 Agustus 2020
Ketua Program Studi
S1 Ekonomi Pembangunan,

Dr. Marlina Ekawati, M.Si., Ph.D.
NIP. 19650311198903200

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Dela Dwiazhari**
Tempat, tanggal lahir : **Singaraja, 21 April 1998**
NIM : **165020107111017**
Jurusan : **ilmu Ekonomi**
Program Studi : **S1 Ekonomi Pembangunan**
Konsentrasi : **Perencanaan Pembangunan**
Alamat : **Jl. Lowokdoro, Perumahan Garaya Permai Blok C 6,
Kebonsari, Sukun, Kota Malang**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Juli 2020

Mengetahui,
Dosen Pembimbing,



Atu Bagus Wiguna, SE., ME
NIP. 2016079101181001

Yang membuat pernyataan,



Dela Dwiazhari
NIM. 165020107111017



Mengetahui,
Ketua Program Studi
S1 Ekonomi Pembangunan ,

Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D.
NIP. 19650311198903200



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR”**. Kegiatan SKRIPSI ini telah berhasil terlaksana dengan dukungan Jurusan ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Secara khusus, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua dan keluarga yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan tiada henti
2. Bapak Drs. Nurkholis, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. rer. Pol, Wildan Syafitri, SE., ME. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
4. Ibu Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
5. Bapak Atu Bagus Wiguna S.E., M.E. selaku dosen pembimbing Skripsi saya.
6. Bapak Dwi Budi Santoso, S.E., M.S., Ph.D. selaku dosen penguji I saya.
7. Bapak Dr. Susilo, S.E, M.S. selaku dosen penguji II saya.
8. Olivia, Ikfina, dan Mulyani selaku teman seperjuangan yang telah banyak mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan Skripsi..
9. Serta teman-teman perkuliahan penulis yang tidak bias disebutkan satu persatu atas saran dan bantuannya selama penyusunan Skripsi.



Semoga segala bantuan dan motivasi yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semuanya.

Malang, 20 Juli 2020

Dela Dwiazhari



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR GRAFIK	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Kajian Teori.....	13
2.1.1. Kemiskinan	13
2.1.2. Konsep Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2.1.3. Konsep Konsumsi Rumah Tangga.....	24
2.1.4. Konsep Investasi (PMA dan PMDN)	25
2.1.5. Konsep Kesehatan.....	28
2.1.6. Konsep Pendidikan	30
2.2. Hubungan Antar Variabel	32



2.2.1. Hubungan PDRB dan Kemiskinan	32
2.2.2. Hubungan Konsumsi dan Kemiskinan	34
2.2.3. Hubungan Investasi dan Kemiskinan	35
2.2.4. Hubungan Kesehatan dan Kemiskinan	36
2.2.5. Hubungan Pendidikan dan Kemiskinan	36
2.3. Penelitian Terdahulu	39
2.4. Kerangka Model	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
3.1. Lokasi Penelitian	45
3.2. Jenis dan Sumber Data	45
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian	45
3.4. Metode Analisis	47
3.4.1. Model Analisis	47
3.4.2. Spesifikasi Model Pada Data Panel	47
3.4.3. Penentuan Terbaik Pada Data Panel	49
3.5. Uji Statistik	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
4.1.1. Kondisi Geografis dan Administratif	53
4.2. Deskriptif Variabel Penelitian	55
4.2.1. Kemiskinan	55
4.2.2. Laju PDRB	57
4.2.3. Konsumsi	60
4.2.4. Investasi (PMA dan PMDN)	62
4.2.5. Kesehatan	65
4.2.6. Pendidikan	67



4.3. Hasil Statistik.....	69
4.3.1. Analisis Deskriptif Variabel.....	69
4.3.2. Penentuan Model Analisis.....	70
4.3.3. Analisis Model Panel.....	71
4.3.4. Uji Statistik.....	74
4.4. Pembahasan.....	76
4.4.1. Pengaruh Laju PDRB Terhadap Kemiskinan.....	76
4.4.2. Pengaruh Konsumsi Terhadap Kemiskinan.....	80
4.4.3. Pengaruh Investasi (PMA dan PMDN) Terhadap Kemiskinan.....	83
4.4.4. Pengaruh Kesehatan Terhadap Kemiskinan.....	88
4.4.5. Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan.....	91
4.5. Kondisi Inklusivitas Pembangunan Di Jawa Timur.....	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
5.1. Kesimpulan.....	98
5.2. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	xv
LAMPIRAN.....	xx



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tabel Ringkasan dari penelitian terdahulu	39
Tabel 3.1. Daftar Variabel Penelitian.....	46
Tabel 4.1. Jumlah Konsumsi Kelompok Makanan Tertinggi Kabupaten/Kota di Jawa Timur (2013-2017)	60
Tabel 4.2. Jumlah Konsumsi Kelompok Makanan Terendah Kabupaten/Kota di Jawa Timur (2013-2017).....	62
Tabel 4.3. Tabel Perbandingan Rata-rata Realisasi PMA Tertinggi dan Terendah di Jawa Timur (2013-2017).....	64
Tabel 4.4. Tabel Perbandingan Realisasi PMDN Tertinggi dan Terendah di Jawa Timur (2013-2017)	64
Tabel 4.5. Statistik Deskriptif	70
Tabel 4.6. Hasil Pengujian Likelihood Ratio Test (Chow Test).....	71
Tabel 4.7. Hasil Pengujian Hausman	71
Tabel 4.8. Hasil Pengujian Model Kemiskinan (Fixed Effect Model).....	72
Tabel 4.10. Kelompok Hubungan Laju PDRB dan Kemiskinan Menurut Kab/Kota. 79	
Tabel 4.11. Kelompok Hubungan Konsumsi dan Kemiskinan Menurut Kab/Kota... 83	
Tabel 4.12. Kelompok Hubungan PMA dan Kemiskinan Menurut Kab/Kota..... 87	
Tabel 4.14. Kelompok Hubungan Kesehatan dan Kemiskinan Menurut Kab/Kota . 90	
Tabel 4.15. Kelompok Hubungan Pendidikan dan Kemiskinan Menurut Kab/Kota. 94	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Indeks Pembangunan Inklusif Di 34 Provinsi, Tahun 2017	3
Gambar 2 1. Lingkaran Setan Kemiskinan	18
Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian.....	42
Gambar 4.1. Peta Provinsi Jawa Timur.....	53
Gambar 4.2. Sebaran Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Berdasarkan PDRB dan Kemiskinan (2013-2017).....	77
Gambar 4.3. Sebaran Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Berdasarkan Konsumsi dan Kemiskinan (2013-2017).....	82
Gambar 4.4. Sebaran Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Berdasarkan PMA Terhadap Kemiskinan (2013-2017).....	85
Gambar 4.5. Sebaran Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Berdasarkan PMDN	85
Gambar 4.6. Sebaran Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Berdasarkan Kesehatan dan Kemiskinan (2013-2017).....	89
Gambar 4.7. Sebaran Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Berdasarkan Pendidikan dan Kemiskinan (2013-2017).....	93



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. PDRB Jawa Timur dan Indonesia 2013-2019 (Persen)	4
Grafik 1.2. Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Indonesia, 2013-2018	4
Grafik 1.3. Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan Pulau Jawa (2018)	5
Grafik 1.4. Tingkat Konsumsi Di Jawa Timur	7
Grafik 1.5. Rata-rata Lama Sekolah Di Jawa Timur	8
Grafik 1.6. Angka Harapan Hidup Di Jawa Timur	9
Grafik 1.7. Realisasi Investasi di Jawa Timur	10
Grafik 4.1. Persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa Timur	55
Grafik 4.2. Persentase penduduk miskin terendah di Jawa Timur	56
Grafik 4.3. Kabupaten/Kota dengan Laju PDRB tertinggi di Jawa Timur Pada Tahun (2013-2017)	58
Grafik 4.4. Kabupaten/Kota dengan Laju PDRB terendah di Jawa Timur Pada Tahun (2013-2017)	59
Grafik 4.5. Perbandingan Kabupaten/Kota dengan Angka Harapan Hidup Terendah dan Tertinggi di Jawa Timur (2013-2017)	66
Grafik 4.6. Rata-rata Lama Sekolah Terendah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Pada Tahun (2013-2017)	68
Grafik 4.7. Rata-rata Lama Sekolah Tertinggi Kabupaten/Kota di Jawa Timur Pada Tahun (2013-2017)	69



ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR

(Studi Kasus di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2017)

Dela Dwiazhari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi

Pembangunan, Universitas Brawijawa, Malang

Email : delladwiazhari@gmail.com

ABSTRAK

Laju PDRB bagi sebagian masyarakat dipandang sebagai tolak ukur untuk melihat kinerja perekonomian di suatu wilayah atau negara. Namun, pada kenyataannya tingkat PDRB yang tinggi kerap kali dibarengi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi pula. Maka dari itu diperlukan suatu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah pertumbuhan inklusif. Di Indonesia sendiri masih ditemukan provinsi yang belum mencapai inklusivitas yang baik, provinsi tersebut ialah Provinsi Jawa Timur. Dimana tingkat PDRB Jawa Timur yang cenderung tinggi dibarengi dengan jumlah penduduk miskin yang masih berada diatas rata-rata nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, konsumsi, PMA, PMDN, kesehatan dan pendidikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur (Studi Kasus di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2013-2017) dengan menggunakan metode analisis data panel dan alat analisis STATA. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh variabel yakni PDRB, konsumsi, PMA, PMDN, kesehatan, dan pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di Jawa Timur. dimana terdapat dua variabel yang memiliki inklusivitas yang baik dengan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan yakni variabel PDRB dan kesehatan, yang artinya jika terjadi peningkatan pada variabel PDRB dan Kesehatan maka akan terjadi penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan di Jawa Timur.

Kata Kunci : PDRB, Konsumsi, PMA, PMDN, Kesehatan, Pendidikan, Kemiskinan, Inklusif



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laju PDRB bagi sebagian masyarakat dipandang sebagai tolak ukur untuk melihat kinerja perekonomian disuatu wilayah, suatu perekonomian dikatakan terjadi peningkatan apabila tingkat laju PDRB lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Namun pada kenyataannya laju PDRB yang tinggi sering kali dibarengi dengan masalah-masalah perekonomian seperti pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan ketidakseimbangan struktural. Hal ini juga yang memperkuat keyakinan bahwa laju PDRB diperlukan, namun tidak mencukupi dalam proses pembangunan suatu wilayah dalam jangka panjang, karena tidak semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya laju PDRB yang tinggi.

Saat ini sebagian besar negara-negara berkembang mulai menyadari bahwa tidak selamanya laju PDRB yang tinggi mencerminkan pembangunan ekonomi yang baik. Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses yang mengakibatkan pendapatan per kapita masyarakat suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu mengalami kenaikan. Namun pada kenyataannya pembangunan ekonomi sering kali dihadapkan dengan masalah kemiskinan, setiap wilayah pastinya akan berusaha menurunkan tingkat kemiskinan dengan mencapai laju PDRB yang tinggi sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat secara maksimal.

Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, dan harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran (Todaro,

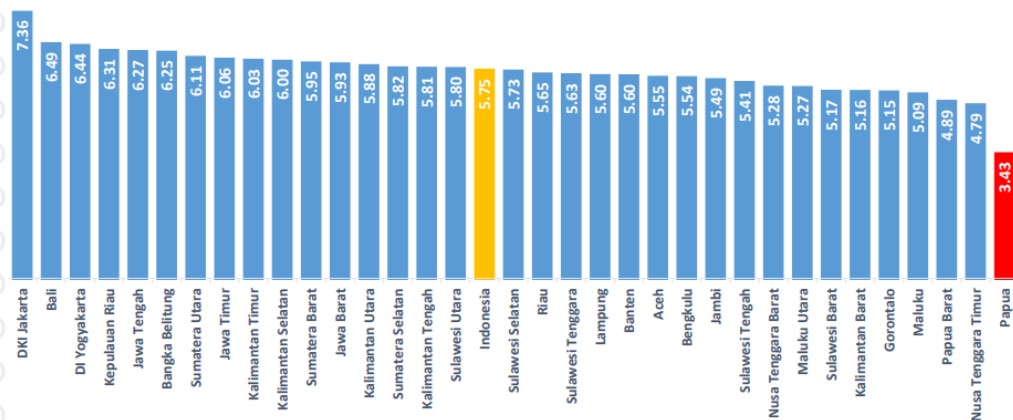


2003). Dalam mendefinisikan pembangunan yang baik dan berkelanjutan mulailah dikenalkan strategi pertumbuhan ekonomi dengan acuan distribusi. atau yang dapat disebut dengan pertumbuhan inklusif. Menurut (Raneiri dan Ramos, 2013) pertumbuhan inklusif merupakan suatu proses yang memastikan bahwa seluruh masyarakat berpartisipasi dalam pertumbuhan itu sendiri yang mana pada akhirnya hasil dari pertumbuhan yang meningkat tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali yang pada intinya pertumbuhan inklusif merupakan pertumbuhan yang bertumpu pada perekonomian yang menitikberatkan pada aspek pemerataan atau distribusi.

Pengukuran inklusivitas perekonomian di setiap Negara berbeda-beda hal ini dikarenakan perbedaan sumber daya dan sistem perekonomian yang ada. Di Indonesia sendiri pada tahun 2017 Kementerian PPN atau Bappenas telah mengeluarkan indeks pertumbuhan ekonomi inklusif yang sesuai dengan karakter perekonomian Indonesia sebagai indikator pembangunan nasional dan daerah di Indonesia dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan memiliki empat aspek penting yakni pertumbuhan yang *pro-growth* (pertumbuhan), *pro-job* (tenaga kerja), *pro-poor* (kemiskinan), dan *pro-equality* (kesetaraan). Konsep pembangunan inklusif Indonesia mempunyai 3 pilar utama yakni pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Di bawah ini merupakan indeks pertumbuhan inklusif di Indonesia berdasarkan provinsi pada tahun 2017.



Gambar 1.1. Indeks Pertumbuhan Inklusif Di 34 Provinsi, Tahun 2017

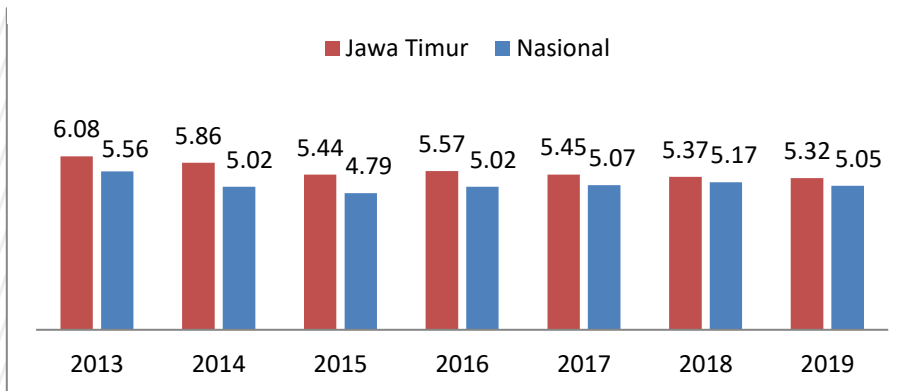


Catatan: nilai 1-3 merupakan kategori "tidak memuaskan", nilai 4-7 merupakan kategori "memuaskan" dan nilai 8-10 merupakan kategori "sangat memuaskan"

Sumber : Bappenas 2017

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa pada tahun 2017 hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia memiliki indeks pertumbuhan inklusif yang memuaskan kecuali provinsi papua. Jika dilihat dalam grafik provinsi dengan tingkat inklusivitas diatas rata-rata nasional didominasi oleh provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Hal ini tidak mengherankan karena. berdasarkan struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada kuartal II-2019 perolehan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa ditambah lagi Pulau Jawa merupakan sentra perekonomian nasional yang tidak dapat dipungkiri jika Pulau Jawa merupakan penyumbang PDB nasional terbesar. Namun sayangnya tingkat PDRB yang tinggi di Pulau Jawa masih dibarengi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi pula, hal ini dibuktikan dengan salah satu provinsi di Pulau Jawa yakni Provinsi Jawa Timur yang masih belum memerlukan percepatan inklusif yang baik. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan PDRB yang cenderung tinggi seperti yang digambarkan pada grafik dibawah ini.

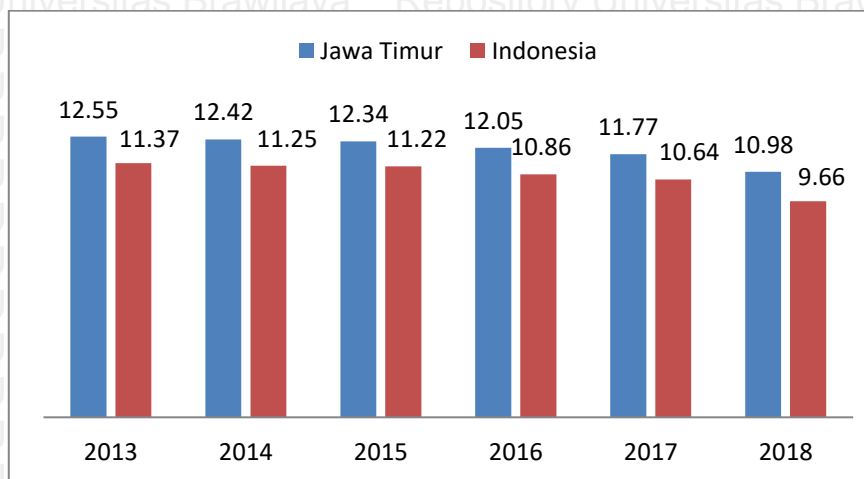
Grafik 1.1. PDRB Jawa Timur dan Indonesia 2013-2019 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2013-2018, diolah.

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa laju PDRB Jawa Timur selalu berada diatas PDB Nasional hal ini mengindikasikan bahwa kinerja perekonomian Provinsi Jawa Timur terbilang cukup baik dari tahun ke tahun. Namun seiring dengan pertambahan tahun laju PDRB Jawa Timur terus mengalami tren penurunan. Meskipun demikian laju PDRB Jawa Timur masih terbilang cukup tinggi. Namun sayangnya laju PDRB Jawa Timur yang tinggi ini dibarengi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi pula seperti yang dipaparkan pada grafik dibawah ini.

Grafik 1.2. Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Indonesia, 2013-2018



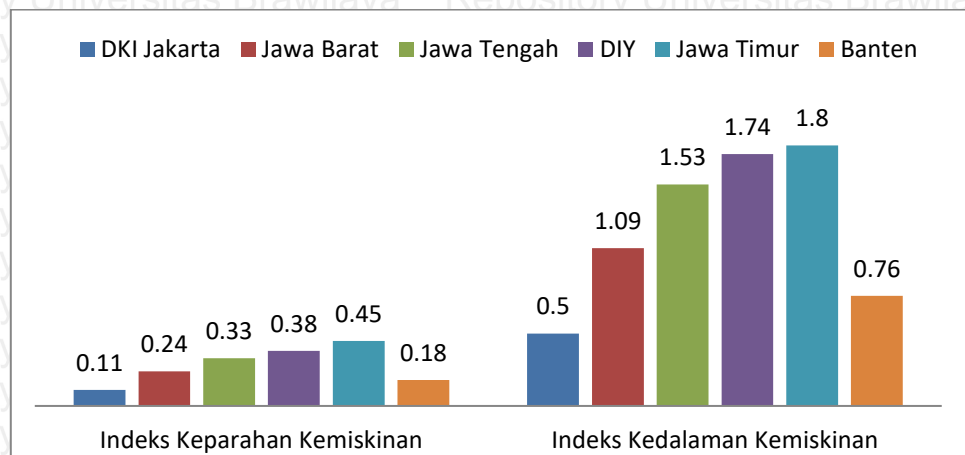
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah.

Berdasarkan data diatas, persentase penduduk miskin Jawa Timur dan Indonesia memiliki tren penurunan, namun penurunan ini masih terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin dalam skala Indonesia.

Dengan demikian kinerja perekonomian Jawa Timur yang ditunjukkan dalam grafik

1.3. mengenai laju PDRB Jawa Timur yang tinggi tidak serta-merta menurunkan persentase penduduk miskin di Jawa Timur. Hal ini diperkuat dengan indeks keparahan serta indeks kedalaman kemiskinan yang ada di Jawa Timur seperti yang dipaparkan dalam grafik di bawah ini:

Grafik 1.3. Indeks Keparahhan dan Kedalaman Kemiskinan Pulau Jawa (2018)



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 Indeks keparahan kemiskinan di Pulau Jawa, terlihat bahwa Provinsi Jawa Timur menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan indeks keparahan kemiskinan tertinggi yakni sebesar 0,56% dan provinsi dengan indeks keparahan kemiskinan terendah dipegang oleh Provinsi DKI Jakarta dengan perolehan sebesar nilai 0,11%. Tidak hanya itu Provinsi Jawa Timur juga menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan indeks kedalaman kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa yakni



sebesar 1,80%. Hal ini semakin membuktikan bahwa Provinsi Jawa Timur memerlukan percepatan inklusif yang baik untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi yang kuat terhadap kemiskinan, pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk dan menyebabkan tingkat kemiskinan cenderung meningkat, namun pada saat mendekati tahap akhir, distribusi pendapatannya akan membaik dan terjadi pengurangan tingkat kemiskinan secara berkesinambungan. Para ahli seperti (Shorrock dan Van Der Houven, 2004) telah menekankan bahwa kemiskinan dapat dikurangi dengan lebih cepat jika strategi pertumbuhan inklusif dan kebijakan distribusi pendapatan khusus diterapkan dengan baik.

Salah satu upaya dalam pengurangan kemiskinan adalah dengan meningkatkan indikator kesejahteraan penduduk salah satunya ialah konsumsi. Tingkat konsumsi dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat kemampuan masyarakat dalam perilaku konsumsi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (John dan Vinc, 2019) dimana semakin tinggi tingkat konsumsi suatu daerah maka semakin makmur daerah tersebut. Tingkat konsumsi dan kemiskinan memiliki keterkaitan dimana tingkat konsumsi mencerminkan daya beli suatu masyarakat.

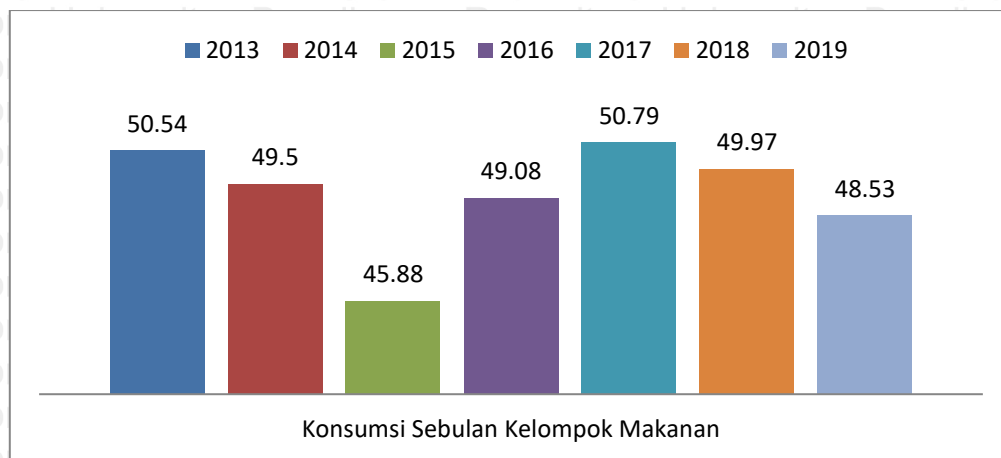
Salah satu indikator konsumsi ialah tingkat konsumsi dalam kelompok makanan.

Terdapat perbedaan jumlah konsumsi kelompok makanan di daerah pedesaan dan perkotaan. Daerah perkotaan cenderung memiliki nilai konsumsi kelompok makanan yang lebih rendah dibanding daerah pedesaan yang mengindikasikan bahwa terjadi perubahan perilaku konsumsi masyarakat perkotaan. hal ini cenderung baik dalam upaya pengentasan kemiskinan karena konsumsi masyarakat tidak condong pada konsumsi kelompok makanan saja (Yoghi Citra,



2014) Konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang dan jasa secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia (Rosydi, 2002). Keynes mengemukakan bahwa konsumsi adalah fungsi positif dari pendapatan rumah tangga, dimana yang berpendapatan tinggi melakukan konsumsi pangan lebih sedikit dari rumah tangga yang berpendapatan rendah, karena pendapatannya yang lain dialokasikan pada konsumsi non pangan (Case and Fair, 2002). berikut ini merupakan grafik tingkat konsumsi Provinsi Jawa Timur

Grafik 1.4. Tingkat Konsumsi Di Jawa Timur



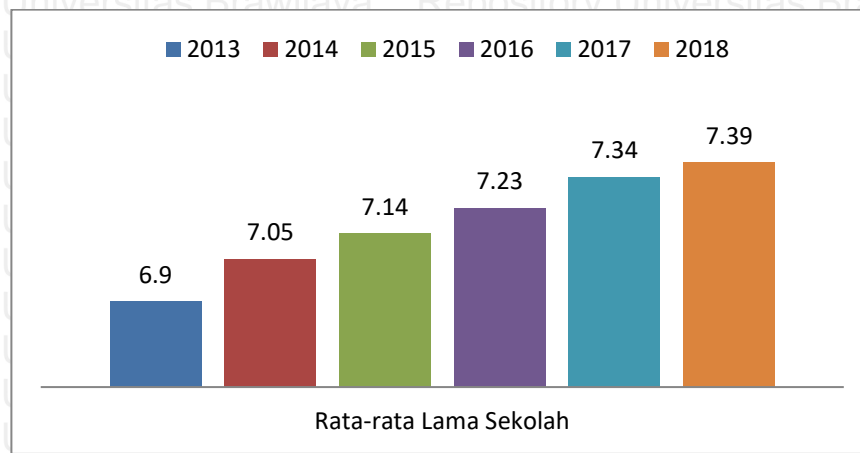
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), diolah.

Jika dilihat pada grafik, tingkat konsumsi masyarakat Jawa Timur cenderung fluktuatif dari tahun ketahun hingga pada tahun 2017 Jawa Timur memiliki tingkat konsumsi tertinggi yakni sebesar 50,79% dan memiliki kecenderungan menurun setelah tahun tersebut. Dalam upaya pembangunan ekonomi suatu daerah Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut (Todaro, 2003).



Kemiskinan sendiri tidak lepas dari sumber daya manusianya. Kualitas SDM memiliki kaitan yang erat dengan penurunan kemiskinan dimana saat kualitas SDM meningkat maka akan menurunkan kemiskinan. Kualitas SDM sendiri dapat diukur dari berbagai hal diantaranya adalah tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Tingkat pendidikan dapat dilihat dari Rata-rata lama sekolah masyarakat di suatu wilayah Berikut merupakan grafik rata-rata lama sekolah di Jawa Timur.

Grafik 1.5. Rata-rata Lama Sekolah Di Jawa Timur

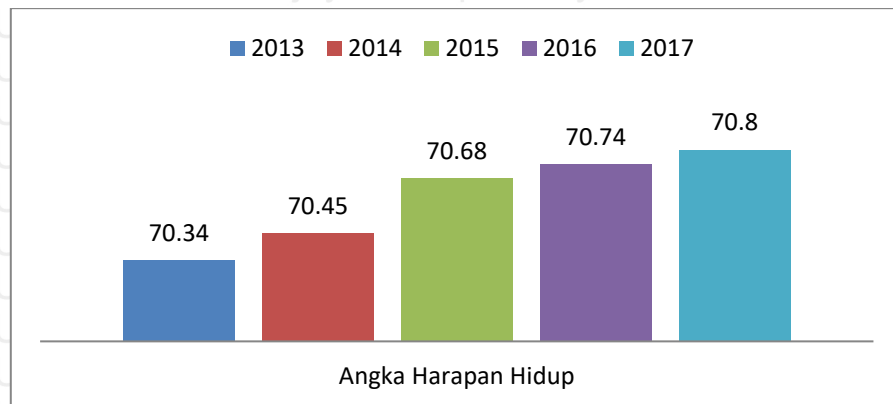


Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan grafik rata-rata lama sekolah diatas dapat dilihat nilai rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Timur memiliki kecenderungan meningkat disetiap tahunnya hal ini cukup baik karna peningkatan kualitas SDM Jawa Timur dapat membantu pengurangan angka kemiskinan yang ada. Hal ini sejalan dengan penelitian (Angeline dan Imelda, 2012) dimana semakin tinggi tingkat pendidikan suatu keluarga maka semakin rendah tingkat kemungkinan kemiskinan keluarga tersebut dimana kontribusi tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat penghasilan. Selain itu tingkat kesehatan juga memiliki pengaruh terhadap kemiskinan (Pervez Z, 2014) dimana income growth dan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu signifikan

dalam pengentasan kemiskinan hal ini berbanding terbalik dengan kesehatan dan pendidikan yang memiliki pengaruh negative dan signifikan dalam pengentasan kemiskinan Variabel kesehatan sendiri memiliki indicator yang bervariasi salah satunya ialah angka harapan hidup. Berikut merupakan grafik angka harapan hidup di Provinsi Jawa Timur

Grafik 1.6. Angka Harapan Hidup Di Jawa Timur



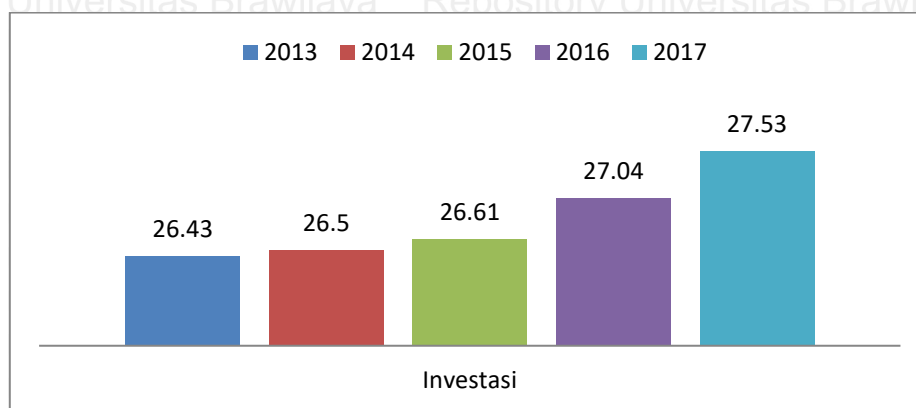
Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan grafik diatas nilai angka harapan hidup di provinsi Jawa Timur memiliki kecenderungan meningkat disetiap tahunnya dengan rata-rata angka harapan hidup selama 70 hingga 70,8 tahun hal ini cukup baik karena tingkat kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan, yang mana kualitas SDM salah satunya dipengaruhi oleh tingkat kesehatan. Dimana pada saat masyarakat dalam keadaan sehat maka kegiatan perekonomian akan berjalan dengan baik sebagaimana yang dikemukakan oleh (Radhitya W, 2014).

Upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan juga memiliki kontribusi penting dimana suatu kebijakan daerah dapat mempengaruhi nilai investasi di daerah tersebut. Investasi memiliki peranan penting bagi perekonomian. Tidak

hanya meningkatkan pendapatan, namun juga menambah lapangan kerja sehingga dapat menyerap angkatan kerja baru yang akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan disuatu wilayah (Abdehafidh dkk, 2019). Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Novita dan Wirathi, 2015) dimana investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Dengan demikian, apabila investasi mengalami peningkatan, maka kemiskinan Provinsi Bali akan menurun. Secara langsung. Berikut merupakan grafik tingkat realisasi investasi di Jawa Timur pada tahun 2013-2017

Grafik 1.7. Realisasi Investasi di Jawa Timur



Sumber: BPS, diolah

Pada grafik diatas realisasi investasi di Jawa Timur memiliki tren peningkatan disetiap tahunnya. Hal ini cukup baik karena peningkatan investasi dapat mendukung penurunan tingkat kemiskinan karena ketersediaan modal dalam pengembangan wilayah dan penyerapan tenaga kerja (Junaidi, 2018). Berdasarkan latar belakang diatas terlihat jelas bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur memerlukan percepatan inklusif yang baik untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang ada. Hal ini terbukti dengan tingkat kemiskinan di Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada skala nasional. Maka dari itu



penulis tertarik untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan pertimbangan pentingnya pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yang hingga saat ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 2013-2017. Maka rumusan masalah dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh laju PDRB, konsumsi, PMA, PMDN, kesehatan, dan pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat pengaruh laju PDRB, konsumsi, PMA, PMDN, kesehatan, dan pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017?

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan tambahan dan memberi kajian yang lebih lengkap mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai faktor mana saja yang



berpengaruh dan kurang berpengaruh dengan studi kasus 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2017.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah serta instansi terkait dalam pengambil kebijakan, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan seberapa besar pengaruhnya sehingga output dari penelitian ini akhirnya dapat digunakan oleh pemerintah dan instansi terkait untuk mempertimbangkan perumusan kebijakan pembangunan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan pembelajaran dalam proses untuk memecahkan sebuah masalah dengan teori, menambah wawasan terkait hubungan antar variabel penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Kemiskinan

Menurut (World Bank, 2000), kemiskinan merupakan keadaan dimana masyarakat kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well being*). Sedangkan inti dari permasalahan kemiskinan adalah batasan ukuran tentang kesejahteraan itu sendiri. Menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori per individu per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri atas perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. (United Nation Development Programme, 1997) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan didalam hidup.

Kemiskinan menurut (Kuncoro, 2000) merupakan salah satu masalah makro ekonomi yang menjadi perhatian khusus di negara manapun, terlebih bagi Negara berkembang. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara atau juga kondisi global. Suatu negara dikatakan miskin biasanya ditandai dengan pendapatan per kapita yang rendah, pertumbuhan tingkat penduduk yang tinggi, sebagian besar tenaga kerja bergerak di bidang pertanian dan terbelenggu dalam lingkaran setan kemiskinan. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan



yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan tingginya tingkat pengangguran.

(Nugroho dan Dahuri, 2004) menyatakan kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural dan struktural. Kemiskinan natural disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemiskinan struktural disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan, kemiskinan ini umumnya dapat dikenali dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan. Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin jika dan hanya jika tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk mentaati tata nilai dan norma dalam masyarakatnya.

Menurut Kartasasmita kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab, yaitu: (a) Rendahnya Taraf Pendidikan, dimana taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang; (b) Rendahnya Derajat Kesehatan, dimana taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan



prakarsa; (c) Terbatasnya Lapangan Kerja, selain kondisi kemiskinan dan kesehatan yang rendah, kemiskinan juga diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan.

Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan; (d) Kondisi Keterisolasian. banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Dimana mereka hidup terpencil sehingga sulit menjangkau layanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati oleh masyarakat lainnya (Rahmawati, 2006).

Menurut (Todaro, 2000), besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan (*poverty line*). Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan yang disebut kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah derajt kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat dipenuhi. Sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan didalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

Sedangkan menurut (OECD, 1976), pengkategorian kemiskinan sangat ditentukan oleh tingkat kebutuhan minimum. Penduduk yang memiliki pendapatan di bawah tingkat kebutuhan minimum tersebut dikategorikan sebagai miskin. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, OECD pun memberikan enam solusi strategis yang sebaiknya dilakukan oleh setiap pemerintahan. Pertama, mengarahkan pembangunan yang memberdayakan. Kedua, membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketiga, menyediakan sistem jaminan perlindungan sosial. Keempat, menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan sumber daya alam



sebagai prioritas utama. Kelima, berinvestasi pada masyarakat pertanian. Hal ini diperlukan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pada negara yang masih didominasi oleh pedesaan. Terakhir, mendukung peningkatan pengetahuan dan pengalaman. Hal ini utamanya sangat diperlukan dalam pengentasan kemiskinan di negara berkembang (Southern countries).

(BPS, 2012) menyatakan untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah dengan menghitung garis kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan-makanan (GKBM).

(Sharp, et al, 1996) dalam (Kuncoro,1997) mengidentifikasi penyebab dari kemiskinan yang dipandang dari sisi ekonomi. Pertama secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumber daya yang menyebabkan munculnya ketimpangan pada distribusi pendapatan. Kedua, kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Ketiga, kemiskinan muncul akibat adanya perbedaan akses dalam modal. Sehingga ketiga penyebab ini memunculkan teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).



2.1.1.1. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*)

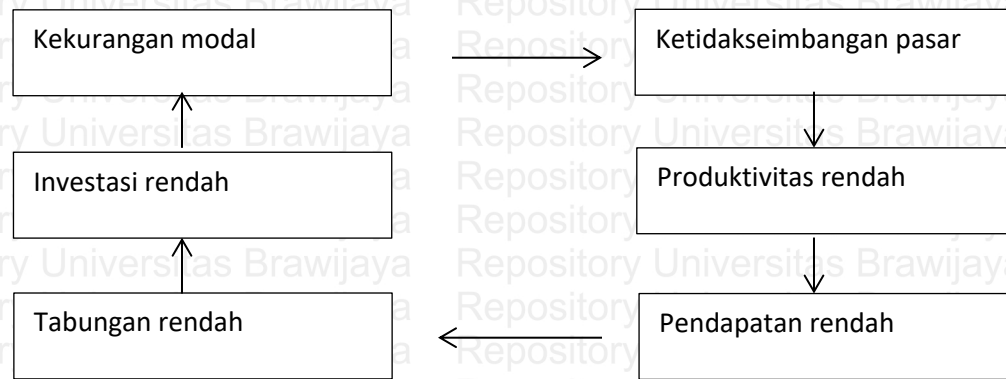
Lingkaran setan kemiskinan adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi, sehingga menimbulkan suatu keadaan dimana negara khususnya negara berkembang mengalami banyak masalah untuk mencapai pembangunan yang lebih tinggi. Sharp mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah memiliki produktifitas yang rendah sehingga memiliki pendapatan yang rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses ke modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini berdasarkan pada teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang dikemukakan oleh (Nurkse, 1953), bahwa “*a poor country is poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena memang miskin). Inti dari teori lingkaran setan kemiskinan adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya pembentukan modal yang tinggi. Disatu sisi, pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan dan di sisi yang lainnya ditentukan oleh pendorong lain dalam menanam modal. Di negara berkembang seperti Indonesia, kedua faktor tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Jadi,



menurut Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi negara berkembang mencapai pembangunan yang pesat yaitu dari sisi *demand* modal dan *supply* modal. Berikut adalah gambar lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*):

Gambar 2 1. Lingkaran Setan Kemiskinan



Sumber: penulis, 2020

Dari segi *supply* modal, lingkaran setan kemiskinan dapat dinyatakan sebagai berikut. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh rendahnya tingkat produktivitas, sehingga hal tersebut menyebabkan rendahnya kemampuan masyarakat untuk menabung. Hal ini akan menyebabkan suatu negara menghadapi kekurangan barang modal dan dengan demikian tingkat produktivitasnya akan tetap rendah sehingga akan mempengaruhi munculnya kemiskinan di negara atau wilayah tersebut. Sedangkan dari sisi *demand* modal, pola dari lingkaran setan kemiskinan memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap negara. Di negara miskin, pendorong untuk melakukan penanaman modal cenderung rendah karena luas pasar yang terbatas, dan hal ini disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang rendah. Yang disebabkan oleh rendahnya produktivitas yang ditunjukkan oleh pembentukan modal



yang terbatas pada masa lalu dan mengakibatkan kemiskinan pada masa yang akan datang. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kurangnya pendorong untuk melakukan penanaman modal, sehingga kemiskinan yang terjadi tidak akan berujung..

2.1.2. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Kuznetz dalam Todaro, 2004) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Menurut (Tarigan, 2004) pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah tersebut. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari capaian pada masa sebelumnya (Kuncoro, 2000). Sedangkan menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi, dan pelakunya adalah inovator atau wiraswasta (*entrepreneur*). Dimana ia berpendapat bahwa kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para *entrepreneur*.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita dimana ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output total (PDB) dan sisi jumlah penduduknya. output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah



penduduk (Aditya, 2010). Kenaikan kapasitas itu sendiri dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan.

Menurut Todaro (2003), ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu : (a) Akumulasi modal, akumulasi modal disini termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (*human resources*). Akumulasi modal akan terjadi jika ada sebagian dari pendapatan sekarang ditabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output di masa-masa mendatang. Investasi juga harus disertai dengan investasi infrastruktur, yakni berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, demi menunjang aktivitas ekonomi produktif. Investasi dalam pembinaan sumber daya manusia bermuara pada peningkatan kualitas modal manusia, yang pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap angka produksi; (b) Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angka kerja (*laborforce*) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya; (c) Kemajuan teknologi, dimana kemajuan teknologi dapat berupa cara -cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional. Ada 3 klasifikasi kemajuan teknologi yaitu; (1) kemajuan teknologi yang bersifat netral terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama; (2) kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (*labor saving*), yaitu tingkat output yang



lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama; (3) kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, hal ini terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita untuk memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif.

Pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, beberapa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain yaitu (Aditya, 2010): (a) Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Bruto (PDB) atau di tingkat regional disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. Baik PDB atau PDRB merupakan ukuran yang global sifatnya, dan bukan merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk yang sesungguhnya, padahal sesungguhnya kesejahteraan harus dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau daerah yang bersangkutan, (b) Produk Domestik Bruto Per kapita/Pendapatan Per kapita Produk domestik bruto per kapita atau produk domestik regional bruto per kapita pada skala daerah dapat digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena lebih tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu negara daripada nilai PDB atau PDRB saja. Produk domestik bruto per kapita baik di tingkat nasional maupun di daerah adalah jumlah PDB nasional atau PRDB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di Negara maupun di daerah yang bersangkutan, atau dapat disebut juga sebagai PDB atau PDRB rata-rata



2.1.2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi (Teori Keynes)

Pada Teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika *Great Depression* melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan Teori Keynes yang mana kegiatan tersebut akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya akan mengakibatkan lumpuhnya perekonomian. Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian tersebut adalah dengan memasukkan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri.

Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan sektor publik terlibat dalam meningkatkan perekonomian secara umum. Dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu yakni *laissez-faire capitalism* (teori kapitalisme). Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dikatakan oleh pemikir beraliran sosialis ini, dimana pihak swasta memiliki tujuan



utama yakni mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus ada suatu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. otoritas tersebut tentu saja pemerintah.

Teori Keynes mengemukakan kebijakan pemerintah yang terlalu mendorong tabungan dan tidak mendorong konsumsi. Keynes juga mendukung pendistribusian kekayaan secara terkendali ketika diperlukan. Teori Keynes kemudian menyimpulkan bahwa ada alasan pragmatis untuk pendistribusian kemakmuran: jika segmen masyarakat yang lebih miskin diberikan sejumlah uang, mereka akan cenderung membelanjakannya daripada menyimpannya; yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Ide pokok dari teori Keynes ini adalah “Peranan Pemerintah” yang tadinya diharamkan dalam Teori Ekonomi Klasik. John Maynard Keynes menjelaskan teori ekonominya dalam buku karangannya yang berjudul “The General Theory Of Employment, Interest And Money” dimana teori Keynes mengedepankan perekonomian melalui 3 sektor yakni:

$$Y = C + I + G + (x - m)$$

Dimana:

Y : Pertumbuhan Ekonomi

G : Pengeluaran Pemerintah

C : Konsumsi Rumah Tangga

x : Ekspor

I : Investasi

m : Impor



2.1.3. Konsep Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga guna menjaga dan menunjang kelangsungan hidup yang meliputi pengeluaran barang dan jasa. Rumah tangga tersebut merupakan individu atau kelompok yang menempati suatu bangunan atau tempat tinggal. Mereka secara individu maupun kelompok mengumpulkan pendapatan dan digunakan untuk kegiatan konsumsi baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa (BPS, 2017). Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga guna menunjang kelangsungan hidupnya. Pengeluaran tersebut meliputi pengeluaran barang maupun jasa.

2.1.3.1. Teori Konsumsi

Teori konsumsi yang dikemukakan oleh JM. Keynes mengatakan bahwa besar kecilnya pengeluaran konsumsi hanya didasarkan atas besar kecilnya tingkat pendapatan masyarakat. Keynes menyatakan bahwa ada pengeluaran konsumsi minimum yang harus dilakukan oleh masyarakat (konsumsi *outonomous*) dan pengeluaran konsumsi akan meningkat dengan bertambahnya penghasilan. Beberapa ciri fungsi konsumsi menurut Keynes yaitu: Pertama, penentu utama dari konsumsi adalah tingkat pendapatan. Kedua, kecenderungan mengkonsumsi secara Marginal (*Marginal Propensity to Consume*) dimana pertambahan konsumsi akibat kenaikan pendapatan sebesar satu satuan. Besarnya MPC adalah antara nol dan satu Dengan kata lain MPC adalah pertambahan atau perubahan konsumsi (ΔC) yang dilakukan masyarakat sebagai akibat pertambahan atau perubahan pendapatan



disposabel atau pendapatan yang siap dibelanjakan (ΔY). Ketiga, rasio konsumsi terhadap pendapatan yang disebut dengan Kecenderungan Mengonsumsi Rata-Rata (*Average Propensity to Consume*), turun ketika pendapatan naik, dengan demikian APC menurun dalam jangka panjang dan MPC lebih kecil dari pada APC (MPC)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi konsumsi menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dan pendapatan disposabel atau pendapatan nasional perekonomian tersebut. Dalam ciri-ciri fungsi konsumsi dinyatakan bahwa APC mengukur pendapatan disposabel yang diinginkan oleh rumah tangga untuk dibelanjakan sebagai konsumsi. MPC mengukur setiap pertambahan pendapatan disposabel yang diinginkan oleh rumah tangga untuk dibelanjakan sebagai konsumsi.

2.1.4. Konsep Investasi (PMA dan PMDN)

Investasi merupakan segala sesuatu yang dikeluarkan dan ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital (*capital stock*). Persediaan kapital terdiri dari pabrik-pabrik, mesin-mesin, kantor dan barang tahan lama yang dipakai dalam proses produksi termasuk rumah-rumah dan persediaan barang-barang yang belum dijual atau dipakai dalam waktu bersangkutan (*inventory*). Dapat diartikan bahwa investasi merupakan pengeluaran yang menambah persediaan kapital.

Menurut (Sukirno, 2008), investasi dapat juga diartikan sebagai pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal untuk menambah kemampuan



memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Menurut (BPS, 2017), Pembentukan Modal Tetap Bruto atau Investasi merupakan kegiatan menambah atau mengurangi asset tetap pada unit produksi dalam waktu tertentu.

Penambahan modal barang mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam wilayah dan luar wilayah (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter barang modal), dan pertumbuhan asset sumber daya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*).

Investasi dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu yang dikeluarkan untuk menambah persediaan, membeli barang modal atau kelengkapan guna menambah kemampuan produksi

Investasi dibagi menjadi dua yakni penanaman modal asing (PMA) dan penanamna modal dalam negeri (PMDN) pada dasarnya kedua investasi tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama yakni penanaman modal disuatu wilayah guna mendukung perekonomian daerah tersebut serta mengambil untung dari adanya kegiatan investasi yang dilakukan.

2.1.4.1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

PMDN menurut BKPM adalah modal negeri yang diartikan sebagai sumber produktif dari masyarakat yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat termasuk hak-hak, benda-benda (bergerak, tidak bergerak) yang dapat disisihkan untuk menjalankan suatu usaha (BKPM, 1985). Dalam Undang-Undang no 6 tahun 1968 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), disebutkan terlebih dulu definisi modal dalam negeri pada pasal



1, yaitu sebagai berikut : (a). Undang-undang ini menjelaskan bahwa “modal dalam negeri” adalah : bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki Negara maupun swasta asing yang berdomosili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 UU No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal asing. (b). Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat terdiri atas perorangan dan/ atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, Yang dimaksud dalam Undang-Undang ini dengan "Penanaman Modal Dalam Negeri" ialah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.

2.1.4.2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman Modal Asing menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2007 merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Menurut (Krugman & Obsfeld, 2004) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal asing adalah arus modal internasional, dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Ciri dari penanaman modal asing adalah penanaman modal asing



tidak hanya melibatkan pemindahan sumberdaya tetapi juga terkait pengendalian. Penanaman modal asing juga dapat berupa pembukaan pabrik baru atau cabang perusahaan di negara lain, merger dengan perusahaan lain ataupun dengan mengakuisisi perusahaan asing atau domestik yang sudah ada di negara lain.

(Salvatore, 1997) juga menyatakan bahwa penanaman modal asing meliputi investasi kedalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik, pengadaan barang modal, pembelian tanah, pembelanjaan peralatan inventaris, dan lain sebagainya. Pengadaan modal asing biasanya dibarengi dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen, dan pihak investor tetap mempertahankan kontrol terhadap dana yang telah ditanamkan.

Penanaman Modal Asing memiliki banyak kelebihan yaitu sifatnya yang permanen atau jangka panjang, adanya andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen, dan pembukaan lapangan pekerjaan baru. Lapangan pekerjaan baru ini penting untuk diperhatikan mengingat sebagai negara yang sedang berkembang, pemerintah Indonesia merupakan isu yang cukup sering dibahas. Dengan adanya pembukaan lapangan pekerjaan baru dan alih fungsi teknologi dari Penanaman Modal Asing, diharapkan produktivitas masyarakat di suatu negara atau wilayah akan meningkat sehingga pendapatan yang didapat juga meningkat dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

2.1.5. Konsep Kesehatan

Dalam undang-undang No 36 tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang



memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Beberapa ekonom beranggapan bahwa kesehatan merupakan fenomena ekonomi yang dapat dinilai dari stok maupun juga dinilai sebagai investasi sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai suatu faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Oleh sebab itu, kesehatan dianggap sebagai modal yang memiliki tingkat pengembalian yang positif baik untuk individu perorangan maupun untuk masyarakat luas.

Penelitian (Mils dan Gilson dalam Hakimudin, 2010) mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi pada sector kesehatan, sehingga dengan demikian ekonomi kesehatan berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut: (1.) Alokasi sumber daya di antara berbagai upaya kesehatan, (2.) Jumlah sumber daya yang digunakan dalam pelayanan kesehatan. (3.) Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan, (4.) Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya, (5.) Dampak upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan pada individu dan masyarakat.

Kesehatan merupakan salah satu variabel kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupannya. Keadaan kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa karena dengan penduduk yang sehat, pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan lancar.



(Arsyad, 2016) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin: kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi. Oleh karena, itu kesehatan yang baik akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan

2.1.6. Konsep Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepirtual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*), sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik.



Pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efesiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka. (Arsyad, 2016).

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Sitepu, 2004).

Menurut (Kuznets dalam Todaro, 2011) pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Todaro menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan



2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Hubungan PDRB dan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan/atau melalui redistribusi pendapatan. Hal ini dilandasi pada teori *trickle-down effect* yang dikembangkan pertama kali oleh Arthur Lewis.

Teori *trickle-down effect* menjelaskan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya. Dengan demikian, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya peningkatan kemiskinan sebagai akibat dari meningkatnya ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih memihak penduduk kaya dibanding penduduk miskin. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan apabila pertumbuhan ekonomi yang terjadi berpihak pada penduduk miskin (*pro-poor growth*).



Pro-poor growth menurut Kakwani (2006) adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan keuntungan atau manfaat bagi penduduk miskin dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan ekonominya. Jika ini terjadi maka akan berdampak semakin banyak penduduk miskin yang mengalami peningkatan pendapatan dan mampu keluar dari kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang *pro-poor* akan terwujud jika pertumbuhan ekonomi lebih banyak dihasilkan dari partisipasi ekonomi penduduk miskin. Hal ini akan berdampak pada tingkat kemiskinan yang semakin mengecil. Terkait dengan hal tersebut, *pro-poor growth* menjadi salah satu konsep pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara khususnya negara sedang berkembang, dimana pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai salah satu alat untuk mengurangi kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik yang menggambarkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut, apakah hanya segelintir orang atau sebagian besar masyarakat. Jika hanya segelintir orang yang menikmati maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan, sebaliknya jika sebagian besar turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan gap antara orang kaya dan orang miskin dapat diperkecil (Todaro & Smith, 2006).

(Todaro & Smith, 2003) mengatakan Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan bukanlah hal yang saling bertentangan, melainkan harus dilaksanakan secara simultan. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau



mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran.

Penelitian (Cholili dan M.Pudjihardjo, 2014) yang menyimpulkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kemiskinan. Walaupun pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, ketimpangan distribusi pendapatan masih terjadi sehingga menyebabkan kemiskinan meningkat.

2.2.2. Hubungan Konsumsi dan Kemiskinan

Konsumsi rumahtangga merupakan pembelanjaan yang dilakukan oleh rumahtangga ke atas barang-barang akhir dan jasa-jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut.

Pembelanjaan rumahtangga untuk membeli kebutuhan-kebutuhan hidupnya seperti makanan dan minuman, pakaian, kendaraan, sewa rumah, hiburan, pendidikan dan perobatan (Sukirno, 2007) Hasil temuan Gan (2013) menunjukkan bahwa pada tahun 2008 di China terjadi peningkatan kemiskinan. Yang mana hal tersebut disebabkan karena menurunnya konsumsi yang dilakukan masyarakat. Demikian pula pada hasil penelitian Hurd (2006) menyatakan bahwa di Cambridge terjadi peningkatan kemiskinan ketika masyarakatnya mengalami kesulitan dalam mengkonsumsi kebutuhan hidupnya. Sejalan dengan itu temuan dari Moav (2008) juga menyatakan bahwa konsumsi yang dilakukan oleh warga London memiliki memiliki peran pada kegiatan ekonomi negaranya. Pada suatu periode warganya banyak melakukan konsumsi dan pada tahun tersebut ternyata terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari periode sebelumnya.



Sebagaimana diketahui bahwa untuk menyebut seseorang itu miskin, digunakan garis kemiskinan sebagai indikatornya yang biasa diukur berdasarkan jumlah konsumsi kalori. Dengan demikian, seharusnya diantara faktor konsumsi total dengan tingkat kemiskinan ada faktor antaranya yakni konsumsi kalori. Akan tetapi konsumsi kalori tidak dimasukkan, sehingga dianggap konsumsi total memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kemiskinan, tanpa ada faktor perantaranya (Anggraini, 2012).

2.2.3. Hubungan Investasi dan Kemiskinan

Menurut (Sukirno, 2000) kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi

Menurut (Adventuna, 2012) Peningkatan investasi dapat mengurangi pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja yang berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan begitu akan mengurangi proporsi angka kemiskinna disuatu wilayah dengan demikian masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dengan meningkatkan kualitas gizi, kesehatan serta pendidikan.



2.2.4. Hubungan Kesehatan dan Kemiskinan

Pembangunan kesehatan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. kesehatan yang berkualitas menyebabkan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga mampu mendapatkan upah yang lebih banyak dalam memenuhi kebutuhan dan terbebas dari kemiskinan. Penelitian (Finkayana dan Urmila Dewi, 2016) menyimpulkan bahwa kesehatan yang baik akan membantu tenaga kerja untuk tetap melakukan kegiatan produksi sehingga peluang dalam meningkatkan pendapatan semakin tinggi untuk mengatasi kemiskinan.

(Subramanian, Belli dan Kawachi, 2002) mengatakan bahwa kesehatan sebagai bentuk dari modal manusia yang sangat penting bagi stabilitas ekonomi. Masyarakat yang kurang sehat dapat menghambat proses pembangunan ekonomi. Selanjutnya dikatakan bahwa hubungan terbalik antara kemakmuran ekonomi dan perbaikan kesehatan tidaklah otomatis dan universal. Pendapat di atas diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Porca dan Harrison, 2005). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan kualitas modal manusia (kesehatan dan pendidikan), efisiensi pajak, dan sistem pengaturan yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Becker, 2002) bahwa pendidikan dan modal manusia lainnya (kesehatan) memegang peranan penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan.

2.2.5. Hubungan Pendidikan dan Kemiskinan

Pendidikan memainkan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi moderen dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006).



Penelitian Finkayana dan Urmila Dewi (2016) menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan modal bagi seseorang dalam terbebas dari kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan sehingga memberikan nilai tambah dan harga jual tinggi. Sudiana dan Sudiana (2015) menyimpulkan bahwa pendidikan akan menurunkan persentase kemiskinan disuatu wilayah walau diperlukan waktu yang cukup lama. Putri dan Yuliarmi (2013) menyimpulkan bahwa pendidikan akan menurunkan kemiskinan sehingga diperlukan adanya bantuan sosial dibidang pendidikan

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan 60 meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh



rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004).

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan.

Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa (Criswardani Suryawati, 2005). Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), di dalam penelitiannya menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus pendidikan SMP, SMA, dan diploma memiliki berpengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (human capital) melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

2.3. Penelitian Terdahulu

Terdapat berbagai macam penelitian terdahulu yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan ringkasan dari berbagai penelitian terdahulu:

Tabel 2.1. Tabel Ringkasan dari penelitian terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1.	John Agyanwu (2013)	C. Determining the Correlates of Poverty for Inclusive Growth in Africa	Y=kemiskinan X=ketimpangan pendapatan, pendidikan dasar, mineral rent, inflasi, populasi, trade, PDRB, bantuan, dan pendidikan menengah	Panel data regression	Dalam penelitian ini variabel ketimpangan pendapatan, pendidikan dasar, mineral rent, inflasi dan populasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan sedangkan variabel PDRB perkapita, bantuan, dan pendidikan menengah berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan hanya variabel trade berpengaruh negative namun tidak signifikan.
2.	Octo Heri Nugiez (2011)	Growth with Equity for the Development of Mexico: Poverty, Inequality, and Economic Growth (1992-2008)	Y=Kemiskinan X1=Ketimpangan ekonomi X2=Pertumbuhan ekonomi	Groth Incidence Curves (GICs)	Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang rendah memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Mexico dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
3.	Neil Lee dan Paul Sissons (2016)	Inclusive growth? The relationship between economic growth and poverty in British cities	Y=poverty X1=demography X2=skill X3=growth	Panel data regression	Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan erat dalam pengentasan kemiskinan, dimana saat pertumbuhan ekonomi tinggi maka tingkat kemiskinan akan menurun seiring dengan perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi..



4.	Abdillah, Inc.Hadi dan Rizky Samudro (2019)	Jaya Analysis of Consun Pattern and Pove Central Java	Y=Kemiskinan X1=Penduduk miskin X2=Pengeluaran Perkapita	Spearman's rank analysis	1. Pola konsumsi rata-rata daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan dengan yang lebih rendah proporsi konsumsi makanan di daerah perkotaan (kurang dari 50 persen). Itu menandakan daerah perkotaan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk kebutuhan sekunder / tersier daripada daerah pedesaan. 2. Ada peningkatan dramatis dalam biaya per kapita dengan biaya per kapita tertinggi 926.617 rupiah di Kota Salatiga dan terendah di 333.656 rupiah di Kabupaten Pemalang pada tahun 2012. 3. Mengingat hasil uji koefisien korelasional (rs) spearman, dapat dilihat bahwa ada hubungan antara proporsi penduduk miskin dan pengeluaran per kapita populasi. Dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi konsumsi suatu daerah, semakin makmur orang-orang di daerah itu atau lebih tinggi adalah pendapatan orang-orang di daerah itu.
5.	Abdelhafidh, Raouf, Saleh, Alhandi (2019)	Does Foreign Direct Investement and Evironmental Degradation Matter For Poverty? Evidence From Developing Countries	Y=Kemiskinan X1=FDI X2=Karbon dioksida	Structural Equations Model (SEM)	Terdapat hubungan kausal dua arah antara FDI dan kemiskinan serta Karbondioksida dengan kemiskinan. Namun ada hubungan kausal searah dari FDI ke emisi karbondioksida. Serta ada hubungan negatif antara FDI dan kemiskinan untuk semua kelompok negara kecuali Afrika.
6.	Pervez	The Role of	Y=Kemiskinan	Data	income growth dan pertumbuhan ekonomi tidak

	Amurrah dan Usman Ahmed Khalil (2014)	Education and Health in Poverty Alleviation Cross Country Analysis	X1=Income Growth X2=Education X3=Health	Envelopm ent Analysis (DEA) with constant return to scale (CRS)	terlalu signifikan dalam pengentasan kemiskinan hal ini berbanding terbalik dengan kesehatan dan pendidikan yang memiliki pengaruh negative dan signifikan dalam pengentasan kemiskinan.
7.	Angeline Pagoy Inelda Montalbo (2012)	M. An Empirical Evidence of the Impact of Education on Poverty	Poverty, income, financial assistance to the family, nature of work, ability to support basic health needs, education needs and shelter needs	Regresi berganda	Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu keluarga maka semakin rendah tingkat kemungkinan kemiskinan keluarga tersebut dimana kontribusi tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat penghasilan.
8.	Kadek Novita A Shanti dan A. P. Pratiwi (2015)	PENGARUH INVESTASI TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI MEDIASI PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI BALI	Y=kemiskinan X1=investasi X2=pertumbuhan ekonomi	Analisis jalur (path analysis)	Secara langsung variabel investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan kemudian Secara langsung variabel investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Hal ini berarti, apabila investasi mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat signifikan. Secara langsung variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan Provinsi Bali. Hal ini berarti, apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, maka kemiskinan Provinsi Bali akan menurun. Secara tidak langsung investasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Provinsi Bali.

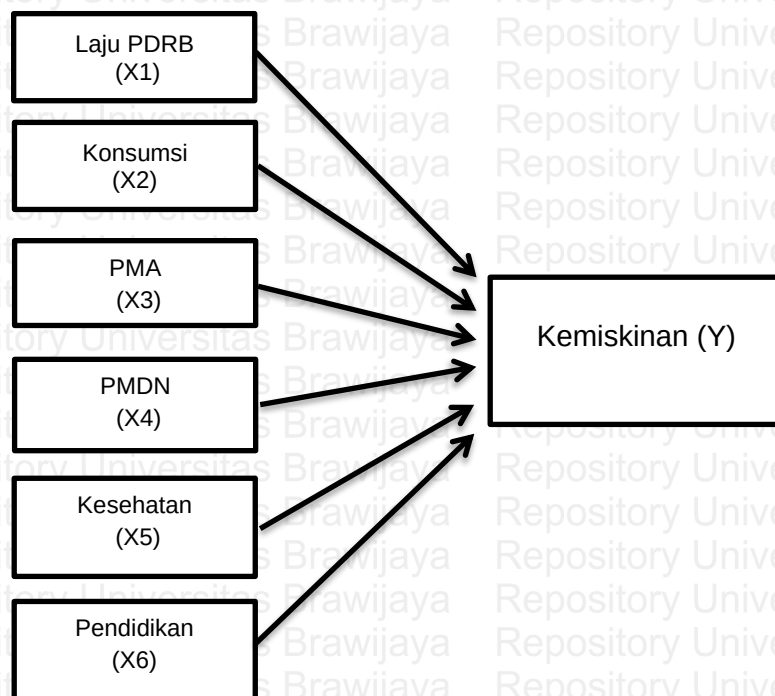
Sumber: Berbagai Sumber, diolah



2.4. Kerangka Model

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan, serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini. Maka berikut merupakan gambar kerangka konseptual pemikiran yang sistematis :

Gambar 2.2. Kerangka Model



Sumber: Penulis, 2020

2.5. Hipotesis Penelitian

H1: PDRB (X₁) Konsumsi(X₂) PMA(X₃) PMDN(X₄) Kesehatan(X₅) Pendidikan(X₆) diduga berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur (Y).

Hipotesis ini diperkuat dengan penelitian (Alberto J, 2011) dimana pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Mexico dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Dimana pada



saat tingkat pertumbuhan ekonomi meningkat maka tingkat kemiskinan akan menurun di Mexico. Hal ini sejalan dengan (Neil dan Paul, 2016) Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan erat dalam pengentasan kemiskinan, dimana saat pertumbuhan ekonomi tinggi maka tingkat kemiskinan akan menurun seiring dengan perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mana hal ini harus terjadi secara berkelanjutan atau inklusif guna mendukung pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang.

(John dan Vinc, 2019) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa terdapat hubungan antara proporsi penduduk miskin dan pengeluaran per kapita. Dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi konsumsi suatu daerah, semakin makmur masyarakat di daerah tersebut dengan kata lain terjadi peningkatan pendapatan dimasyarakat sehingga terjadi peningkatan konsumsi meskipun pola konsumsi di daerah pedesaan dan perkotaan memiliki perbedaan dimana daerah pedesaan lebih banyak menghasilkan konsumsi dalam kelompok makanan sedangkan wilayah perkotaan sebaliknya. Sejalan dengan penelitian (Gan, 2013) pada tahun 2008 di China terjadi peningkatan angka kemiskinan hal ini dikarenakan oleh penurunan tingkat konsumsi masyarakat China dimana dalam penelitian tersebut tingkat konsumsi dan kemiskinan memiliki pengaruh negatif.

Menurut (Abdelhafidh dk, 2019) Terdapat hubungan kausal dua arah antara FDI dan kemiskinan serta Karbondioksida dengan kemiskinan. Namun ada hubungan kausal searah dari FDI ke emisi karbondioksida. Serta ada hubungan negatif antara FDI dan kemiskinan untuk semua kelompok negara kecuali Afrika. Hal ini sejalan dengan penelitian (Junaidi, 2018) dimana perkembangan investasi PMA,



PMDN serta perkembangan PDRB berpengaruh signifikan terhadap upaya penurunan kemiskinan di Sulawesi Utara.

Kesehatan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan hal ini dikemukakan oleh penelitian (Pervez dan Usman, 2014) dimana income growth dan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu signifikan dalam pengentasan kemiskinan hal ini berbanding terbalik dengan kesehatan dan pendidikan yang memiliki pengaruh negative dan signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu (Radhitya, 2014) menemukan bahwa variabel kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.

Pendidikan merupakan suatu upaya untuk pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia di setiap wilayah. Dimana pendidikan sendiri memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan seperti halnya dengan penelitian oleh (Angeline dan Imelda, 2012) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan suatu keluarga maka semakin rendah tingkat kemungkinan kemiskinan keluarga tersebut dimana kontribusi tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat penghasilan suatu keluarga. Hal ini sejalan dengan penelitian (Loyce V. Omari dan Willy Muturi 2016) studi tersebut menemukan bahwa komposisi pengeluaran anggaran pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan di Kenya khususnya pengeluaran sektor pertanian dan sektor pendidikan hal ini guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik dan merata.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Penetapan daerah penelitian ini didasarkan pada pertimbangan untuk memudahkan penulis mengumpulkan data yang diperlukan, agar waktu, biaya dan tenaga dapat dihemat seefisien mungkin. Serta didasari pada permasalahan kemiskinan di Jawa Timur yang cenderung tinggi dibandingkan dengan skala nasional dimana hal ini belum mewujudkan percepatan inklusif yang baik di Jawa Timur.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari situs BPS, BKPM, internet, ataupun publikasi lainnya yang terdiri dari data kemiskinan, laju PDRB, konsumsi, PMA, PMDN, kesehatan dan pendidikan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2017. Data sekunder yang digunakan adalah data panel yakni data yang terdiri dari data deret waktu (*time series data*) untuk kurun waktu 2013-2017 serta data kerat lintang (*cross section data*) yang terdiri dari 38 data kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diteliti sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih penulis maka penulis mengelompokan variabel yang



digunakan dalam penelitian ini menjadi variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (idependen). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 3.1. Daftar Variabel Penelitian

Variabel Dependen			
No.	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Satuan
1.	Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur	Persen
Variabel Independen			
No.	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Satuan
1.	PDRB	Laju PDRB di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur	Persen
2.	Konsumsi	Total konsumsi rumah tangga perkapita berdasarkan kelompok makanan Di 38 Kabupaten/Kota Di Jawa Timur.	Persen
3.	PMA	Total nilai realisasi investasi PMA di 38 Kabupaten/Kota Di Jawa Timur.	US Dollar
4.	PMDN	Total nilai realisasi investasi PMDN di 38 Kabupaten/Kota Di Jawa Timur.	Rupiah
5.	Kesehatan	Nilai angka harapan hidup di 38 kabupaten/kota di Jawa Timu	Tahun
6.	Pendidikan	Nilai rata-rata lama sekolah di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur	Tahun

Sumber: Penulis, 2020



3.4. Metode Analisis

3.4.1. Model Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis panel data (*pooled data*) sebagai alat mengolah data menggunakan STATA Dimana analisis panel data merupakan kombinasi antara analisis deret waktu (*time-series data*) data berupa data tahun yakni 2013-2017 dan deret unit (*unit-section data*) data berupa data 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dalam model data panel, persamaan data panel dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\text{Kemiskinan}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{PDRB}_{it} + \beta_2 \text{Konsumsi}_{it} + \ln \beta_3 \text{PMA}_{it} + \ln \beta_4 \text{PMDN}_{it} + \beta_5 \text{Kesehatan}_{it} + \beta_6 \text{Pendidikan}_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

β_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien Regresi

e = Komponen error

i = Cross section (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur)

t = Time series (Tahun 2013-2017)

3.4.2 Spesifikasi Model Pada Data Panel

Sejalan dengan jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dan dengan mempertimbangkan data yang diperoleh, maka metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Menurut (Gujarati, 2012), data panel merupakan kombinasi dari data *time series* dan data *cross section*. Menurut (Wibisono, 2005) terdapat beberapa keunggulan data panel, antara lain:



1. Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu.
2. Kemampuan mengontrol heterogenitas ini menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
3. Data panel mendasarkan diri pada observasi *cross section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok untuk digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi kepada data yang lebih informatif, lebih variatif, dan kolinearitas (multikolinearitas) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan (*degree of freedom*) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.
4. Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin akan ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Data panel yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi sangat bermanfaat karena data panel dapat membantu peneliti untuk mendalami efek ekonomi yang tidak dapat diperoleh hanya dengan menggunakan data *time series* atau data *cross section*. Dengan mengakomodasi informasi yang terkait dengan variabel-variabel *time series* dan *cross section*, data panel secara substansi mampu untuk mendalami masalah *omited variabel*. Selain itu, data panel dapat mengontrol heterogenitas setiap variabel sehingga dapat dijadikan data untuk membangun model perilaku yang lebih kompleks.

Dalam analisis data panel dibagi menjadi tiga macam pendekatan yang terdiri atas pendekatan *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan *Common Effect Model* (CEM)



Merupakan sebuah pendekatan yang mengestimasi suatu model data panel dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Pendekatan ini secara sederhana menggabungkan seluruh data *time series* dan data *cross section*.

2. Pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM)

Salah satu kesulitan prosedur data panel adalah asumsi intersep dan *slope* yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan adalah dengan memasukkan variabel *dummy* untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik *cross section* maupun *time series*.

3. Pendekatan Random Effect Model (REM)

Penambahan variabel *dummy* dalam *Fixed Effect Model* dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi parameter yang diestimasi. Model data panel yang didalamnya melibatkan korelasi antar *error term* karena terjadinya perubahan waktu yang dapat diatasi dengan pendekatan model komponen eror (*error component model*).

3.4.3 Penentuan Terbaik Pada Data Panel

Dalam menentukan model terbaik diantara *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model* dapat menggunakan 2 teknik estimasi model. Dua teknik ini digunakan dalam regresi data panel untuk mendapatkan model yang tepat dalam estimasi regresi data panel, yaitu:

1. Chow Test



Pemilihan antara model ini dapat dilakukan dengan *Chow Test*. Pengujian ini dilakukan untuk melihat ada atau tidak efek individu dalam model. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan *fixed effect model* lebih baik dibanding model regresi data panel tanpa variabel *dummy*. Hipotesis yang digunakan pada *Chow Test* adalah sebagai berikut

H_0 : *Common Effect Model* (CEM)

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Apabila Probabilitas ($\text{Prob} > F$) lebih kecil dari 5% (0,05), maka H_0 ditolak sehingga model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Apabila nilai probabilitas ($\text{Prob} > F$) lebih besar dari 5% maka H_0 diterima sehingga model yang tepat untuk digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM).

2. *Hausman Test*

Pemilihan model antara *Fixed Effect* dan *Random Effect* dilakukan dengan menggunakan *Hausman Test*. *Hausman Test* merupakan salah satu bentuk *chi square test* yang dilakukan berdasarkan bentuk kuadrat dan selisih antara konsekuen estimator dengan efisien estimator. Pada model analisis data panel dengan efek tetap diperlukan estimator yang konsisten. Sedangkan pada model analisis data panel dengan efek acak diperoleh estimator yang efisien. Untuk dilakukan uji hipotesis apakah efek individu tidak berkorelasi atau berkorelasi dengan variabel bebas. Hipotesis yang digunakan dalam *Hausman Test* adalah:

H_0 : *Random Effect Model* (REM)

H_1 : *Fixed Effect Model* (FEM)

Apabila probabilitas ($\text{Prob} > F$) lebih kecil dari 5% ($<0,05$) maka H_0 ditolak sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* dan



apabila probabilitas ($\text{Prob} > F$) lebih besar dari 5% ($>0,05$) maka H_0 diterima sehingga model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model*

3.5. Uji Statistik

Dalam uji statistik dilakukan dengan tiga pengujian, yaitu uji parsial (uji t), uji simultan (uji f), dan uji koefisien determinasi (uji R^2).

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk memperlihatkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Uji t adalah uji hipotesis mengenai koefisien regresi individual. Pengujian ini menentukan apakah H_0 diterima atau tidak. H_0 menempati posisi yang menjelaskan bahwa ada atau tidaknya hubungan antara variabel dependen dan independen. Pengambilan keputusan hasil dari uji t tergantung dari nilai probabilitas lebih kecil atau lebih besar dibandingkan dengan nilai α yang sudah ditentukan.

- a. Jika nilai $P > |t|$ lebih kecil dari 5% (0,05) maka H_0 ditolak yang berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai $P > |t|$ lebih besar dari 5% (0,05) maka nilai H_0 diterima yang berarti variabel independen berpengaruh tetapi tidak secara signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) merupakan pengujian signifikansi dari keseluruhan regresi sampel atau pengujian hipotesis secara bersama-sama. Pengambilan



keputusan dilihat dari nilai probabilitas F statistik ($\text{Prob} > F$) dimana akan dibandingkan dengan nilai α yang telah ditentukan.

- a. Jika nilai probabilitas F-statistik $> \alpha$ maka H_0 diterima yang mengartikan bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen tetapi pengaruhnya tidak signifikan.
- b. Jika nilai probabilitas F-statistik $< \alpha$ maka H_0 ditolak yang mengartikan bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan.

3. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai dari uji R^2 memiliki batasan yaitu $0 \leq R^2 \leq 1$, menandakan bahwa semakin nilai R^2 mendekati angka 1 maka semakin besar kemampuan variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

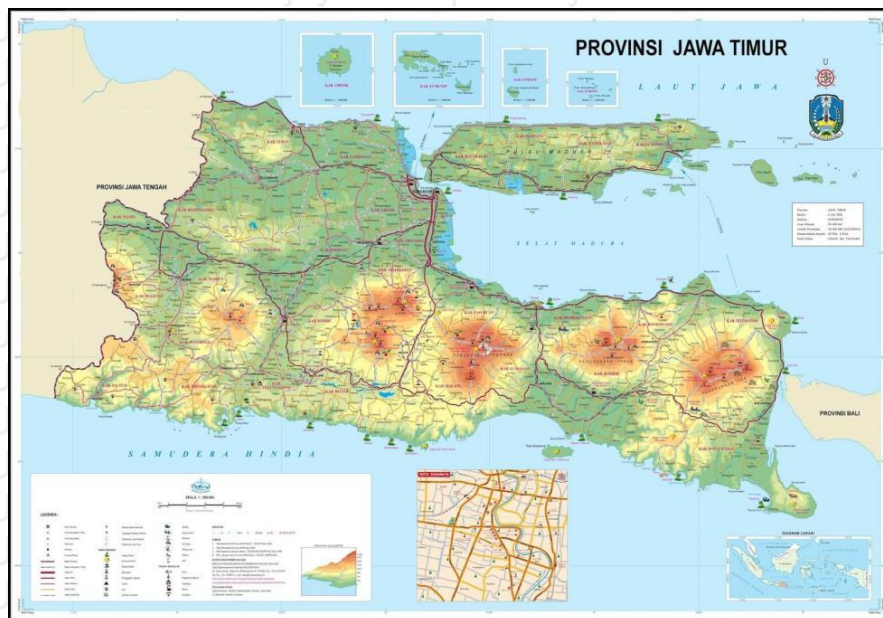
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Kondisi Geografis dan Administratif

Jawa Timur merupakan provinsi paling timur di Pulau Jawa, dimana berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah dan provinsi Bali. Secara geografis terletak di antara 111°00' Bujur Barat – 114°04' Bujur Timur dan 7°02' Lintang Utara – 8°04' Lintang Selatan. Luas wilayah Jawa Timur adalah sebesar 47.963 km² yang meliputi dua bagian utama, yaitu: (i) Jawa Timur daratan dan (ii) Kepulauan Madura.

Jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2017 mencapai 39.292.972 jiwa.

Gambar 4.1. Peta Provinsi Jawa Timur



Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Timur



Sekitar 88,70 persen wilayah darataan Jawa Timur atau 42.541 km² berada di pulau Jawa, sedangkan 11.30 persen atau sebesar 5.422 km² berada di pulau Madura. Dalam hal administratif, Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Jawa Timur terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), yaitu: (i) Bakorwil I Madiun meliputi Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kota Blitar, kab. Blitar, dan Kab. Nganjuk; (ii) Bakorwil II Bojonegoro meliputi Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kota Mojokerto, Kota Kediri, kab. Kediri, Kab. Jombang, dan Kab. Lamongan; (iii) Bakorwil III Malang, meliputi Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kota Probolinggo, kab. Probolinggo, kab. Lumajang, kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo dan Kab. Banyuwangi, serta (iv) Bakorwil IV Pamekasan meliputi, Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, kab. Gresik, kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan kab Sumenep.

Secara topografi Jawa Timur masuk dalam daerah yang mayoritas lebih banyak memiliki dataran rendah. Hal ini dikarenakan wilayah Jawa Timur 60% (28.833km) merupakan dataran rendah, dan hanya kurang lebih 40% (17.597km) yang merupakan dataran tinggi. Wilayah yang termasuk dataran rendah seperti Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, dan lai-lain. Di wilayah kota/kabupaten ini, tidak ada atau jarang kita jumpai gunung atau perbukitan. Berbeda dengan wilayah seperti Malang, Batu, dan Lumajang yang disana banyak kita jumpai gunung dan pegunungan.

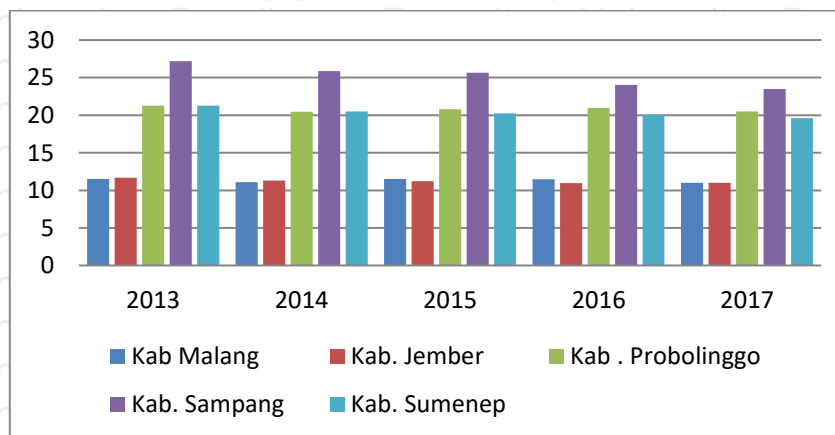


4.2. Deskriptif Variabel Penelitian

4.2.1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sering kali muncul di suatu wilayah atau negara. Menurut kuzsnet, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki korelasi yang cukup erat sehingga diharapkan saat pertumbuhan ekonomi meningkat pada titik tersebut juga tingkat kemiskinan harus memiliki kecenderungan menurun. Namun, pada kenyataannya tidak semua wilayah atau negara dengan tingkat PDRB yang tinggi diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah. Menurut (Nurkse, 1953) adanya ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, dan kurangnya modal menjadi penyebab produktivitas di suatu wilayah rendah sehingga pendapatan yang diterima juga rendah. Rendahnya pendapatan ini berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, dan rendahnya tabungan serta investasi menyebabkan munculnya keterbelakangan yang bermuara kepada kemiskinan. Berikut merupakan grafik 5 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan tingkat persentase penduduk miskin tertinggi pada tahun 2013-2017.

Grafik 4.1. Persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa TImur

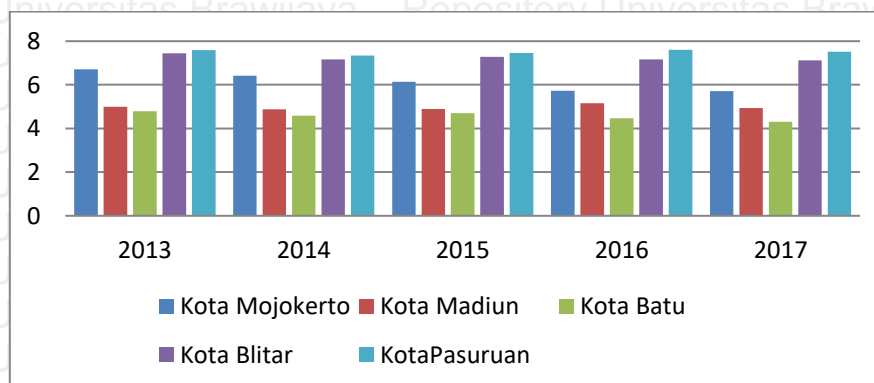


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah



Pada Grafik 4.1. menampilkan 5 Kabupaten/Kota dengan tingkat jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Data tersebut didapatkan berdasarkan nilai rata-rata kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin tertinggi Jawa Timur sehingga didapatkan 5 kabupaten/kota yakni Kabupaten Malang, Kabupaten Sampang, Kabupaten Jember, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Probolinggo dengan satuan persen. Dari kelima daerah tersebut, 2 Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi merupakan kabupaten yang terdapat di Pulau Madura. Tingginya tingkat kemiskinan yang terdapat pada Kabupaten/Kota di Pulau Madura disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor SDA dan SDM yang ada di Pulau Madura yang cenderung rendah yang mana rata-rata lama sekolah kabupaten di Pulau Madura masih terbilang rendah yakni kisaran antara 3 hingga 5 tahun saja yang mana hal ini terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah yakni selama 12 tahun lamanya. Meskipun memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur, tetapi kedua Kabupaten yang terdapat di Pulau Madura ini memiliki tren kemiskinan yang menurun dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir

Grafik 4.2. Persentase penduduk miskin terendah di Jawa Timur



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

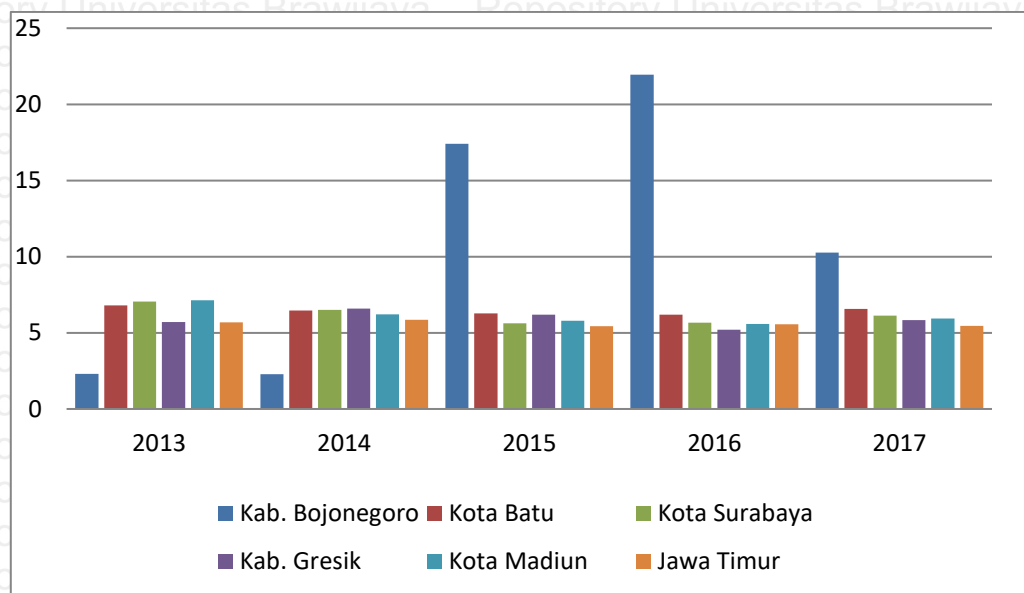


Pada Grafik 4.2. menampilkan perbandingan tingkat penduduk miskin terendah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017. Kemiskinan terendah didominasi oleh daerah perkotaan yakni Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Batu, Kota Blitar, dan Kota Pasuruan. Secara umum, kemiskinan yang terdapat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengalami tren penurunan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.. Hal ini terbukti pada salah satu provinsi yang ada di Pulau Jawa yakni Provinsi Jawa Timur dimana Jawa Timur sendiri memiliki tingkat PDRB yang terbilang cukup tinggi namun hal ini juga dibarengi dengan tingkat penduduk miskin yang tinggi pula. Dalam penelitian ini tingkat kemiskinan Jawa Timur digambarkan dengan jumlah penduduk miskin yang ada di 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur.

4.2.2. Laju PDRB

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Pada umumnya nilai pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) sedangkan jika yang dihitung adalah pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka menggunakan Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB). PDRB disetiap daerah memiliki nilai yang berbeda-beda yang disebabkan oleh perbedaan kinerja perekonomian di suatu daerah. Berikut merupakan grafik laju PDRB Kabupaten/Kota tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2013-2017

Grafik 4.3. Kabupaten/Kota dengan Laju PDRB tertinggi di Jawa Timur (2013-2017)



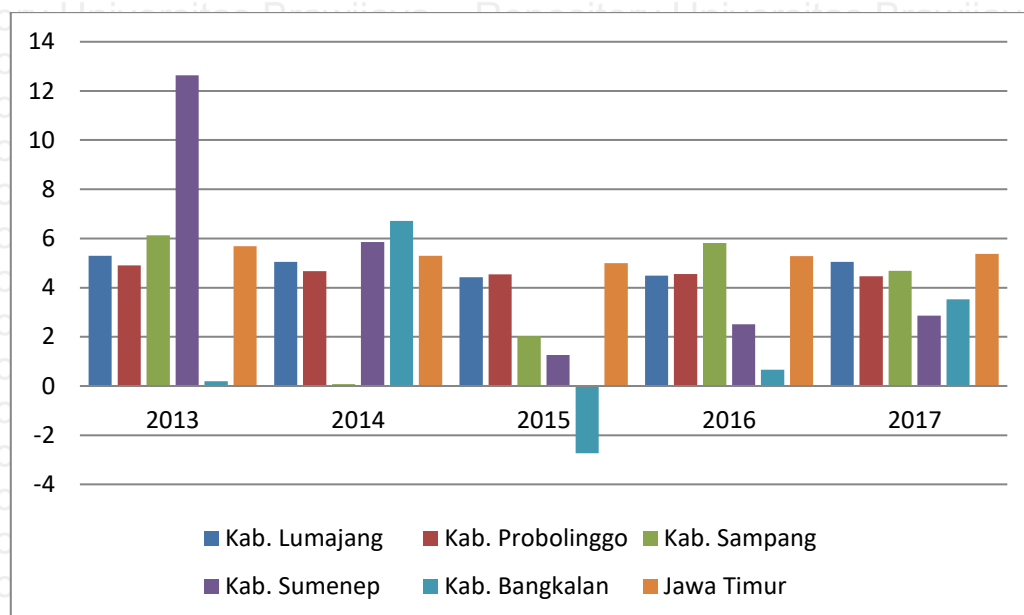
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada Grafik 4.3 menampilkan 5 Kabupaten/Kota dengan laju PDRB tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Data tersebut didapatkan berdasarkan nilai rata-rata kabupaten/kota dengan laju PDRB tertinggi di Jawa Timur sehingga didapatkan 5 kabupaten/kota yakni Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kota Batu, Kota Madiun dan Kota Surabaya dengan satuan persen. Dimana daerah pertama dengan rata-rata laju PDRB tertinggi adalah Kabupaten Bojonegoro dengan nilai rata-rata laju PDRB pada Tahun 2014-2018 adalah 11.266%. Kabupaten Bojonegoro juga memiliki tren pertumbuhan ekonomi yang cenderung fluktuatif dengan laju PDRB tertinggi terjadi pada Tahun 2016 (21,95%) dan laju PDRB terendah terjadi pada Tahun 2014 (2,29%).

Posisi kedua Kabupaten/Kota dengan tingkat laju PDRB tertinggi ditempati oleh Kota Batu seperti yang kita ketahui Kota Batu sendiri merupakan salah satu kota yang mengedepankan sisi wisata daerahnya maka tidak heran jika Kota Batu

mampu meraih tingkat rata-rata laju PDRB yang cukup tinggi yakni sebesar 6,652% dengan titik terendahnya pada tahun 2018 sebesar 6,5%. Kemudian disusul dengan Ibukota Jawa Timur yakni Kota Surabaya yang mencapai rata-rata tingkat laju PDRB sebesar 6,252% dengan tingkat laju PDRB terendah pada tahun 2015 sebesar 5,97%. Dan yang terakhir diduduki oleh Kabupaten Gresik dan Kota Madiun yang masing-masing memiliki rata-rata tingkat laju PDRB sebesar 6,18% dan 6,11%.

Grafik 4.4. Kabupaten/Kota dengan Laju PDRB terendah di Jawa Timur (2013-2017)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada Grafik 4.4. memperlihatkan laju PDRB di 5 Kabupaten/Kota terendah di Provinsi Jawa Timur. Daerah pertama dengan pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah Kabupaten Bangkalan dengan rata-rata tingkat laju PDRB pada 2013-2017 adalah 2,596% dan memiliki tren yang fluktuatif. Daerah kedua adalah Kabupaten Sumenep dengan rata-rata laju PDRB sebesar 3,304%. Daerah ketiga adalah Kota



Sampang dengan rata-rata laju PDRB sebesar 3,506%. Daerah terakhir ditempati oleh Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo yang masing-masing sebesar 4,9% dan 4,6%.

Nilai laju PDRB dalam penelitian ini menggunakan satuan Milyar Rupiah. Di Jawa Timur sendiri sektor industri, otomotif, pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan tumpuan utama pertumbuhan ekonomi. Secara umum kegiatan ekonomi yang terus bertumbuh akan menciptakan peningkatan lapangan kerja maupun peningkatan kualitas buruh, dengan tingginya tingkat laju PDRB maka akan berdampak pada naiknya konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan yang pada akhirnya dapat mengentas masalah kemiskinan.

4.2.3. Konsumsi

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga guna menjaga dan menunjang kelangsungan hidup yang meliputi pengeluaran barang dan jasa. Rumah tangga tersebut dapat berupa individu atau kelompok yang menempati suatu bangunan atau tempat tinggal. Menurut teori Keynes konsumsi memiliki peran yang cukup penting dalam perekonomian dimana kegiatan konsumsi yang kita lakukan dapat menjadi sebuah pendapatan bagi seseorang dan begitu pula sebaliknya.

Tabel 4.1. Konsumsi Tertinggi Kabupaten/Kota di Jawa Timur (2013-2017)

Tahun	Kota Surabaya	Kab. Sidoarjo	Kota Malang	Kota Madiun	Kab. Gresik
2017	758750	618670	632530	584040	622010
2016	727886	594472	523578	544762	570447
2015	581474	557350	494076	493939	455986
2014	511325	437663	462944	422575	394324
2013	429746	425902	397855	411261	335874



Rata-Rata	601836.2	526811.4	502196.6	491315.4	475728.2
------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pada Grafik 4.3 menampilkan 5 Kabupaten/Kota dengan Jumlah Konsumsi tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Data tersebut didapatkan berdasarkan nilai rata-rata kabupaten/kota dengan jumlah konsumsi tertinggi di Jawa Timur sehingga didapatkan 5 kabupaten/kota yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, Kota Madiun dan Kabupaten Gresik dengan satuan ribu rupiah.

Jumlah konsumsi rumah tangga disetiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam tabel 4.1 diatas dipaparkan terkait jumlah konsumsi tertinggi kabupaten/kota di Jawa Timur menurut kelompok makanan. Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang menduduki peringkat tertinggi dalam rata-rata pengeluaran konsumsi menurut kelompok makanan hal ini cukup wajar karna jika kita telisik lebih dalam ketiga kabupaten.kota tersebut berada dalam satu lingkup yang saling berdekatan seperti yang kita ketahu Kota Surabaya merupakan ibukota Jawa Timur yang merupakan pusat perekonomian serta pemerintahan di Provinsi Jawa Timur maka tak heran jika pengeluaran konsumsi cenderung tinggi hal ini punberdampak pada daerah sekitar Kota Surabaya yakni Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang. Dan daerah dengan tingkat konsumsi tertinggi ini didominasi oleh kabupaten/kota besar di Jawa Timur yang memiliki kawasan industry atau pun pariwisata yang pada dasarnya daerah tersebut memiliki perekonomian yang cukup stabil. Berikut ini merupakan kabupaten/kota yang memiliki jumlah konsumsi menurut kelompok makanan terendah di Jawa Timur.



Tabel 4.2. Jumlah Konsumsi Terendah Kabupaten/Kota di Jawa Timur (2013-2017)

Tahun	Kab. Ponorog o	Kab. Probolingg o	Kab. Pamekasa n	Kab. Jember	Kab. Bondowos o
2017	388689	345817	377797	351840	372145
2016	291719	302151	324033	331426	342531
2015	290569	291263	294276	313535	311733
2014	257247	273035	280730	281279	283029
2013	247718	264362	227871	251079	256998
Rata-Rata	295188.4	295325.6	300941.4	305831.8	313287.2

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Berdasarkan pada tabel diatas terdapat 5 kabupaten dengan jumlah konsumsi menurut kelompok makanan terendah di Jawa Timur. Untuk posisi pertama diduduki oleh Kabupaten Ponorogo dengan rata-rata jumlah konsumsi menurut kelompok makanan ditahun 2013-2017 sebesar Rp. 295.188,4 kemudian disusul oleh Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso. jika kita lihat di kelima daerah tersebut hampir keseluruhannya memiliki masalah perekonomian seperti Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Jember yang tingkat persentase penduduk miskinnya cukup tinggi, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Pamekasan dengan rata-rata lama sekolah yang rendah. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan total konsumsi rumah tangga perkapita berdasarkan kelompok makanan dengan satuan rupiah. Hal ini guna mengetahui seberapa besar nilai konsumsi masyarakat di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur per bulannya.

4.2.4. Investasi (PMA dan PMDN)

Investasi merupakan aktivitas pengeluaran atau pembelanjaan penanam modal untuk membeli barang-barang modal dan juga perlengkapan-perengkapan



produksi dengan tujuan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Di provinsi Jawa Timur investasi memiliki peranan penting bagi perekonomian. Tidak hanya meningkatkan pendapatan, namun juga menambah lapangan kerja sehingga dapat menyerap angkatan kerja baru. Investasi dibagi menjadi 2 yakni investasi dalam negeri dan investasi asing dimana keduanya penting dalam peningkatan perekonomian di suatu wilayah. Penanaman Modal Asing merupakan salah satu komponen pada pembentukan *Gross Domestic Product* yang dapat digunakan oleh masing-masing negara atau wilayah untuk meningkatkan pelayanan publik untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Menurut (Todaro, 2006) tujuan pembangunan ekonomi bersifat multidimensional dimana pembangunan ekonomi diharapkan dapat mengurangi ketimpangan serta meningkatkan kemampuan dalam menentukan pilihan hidup yang ada (*enlarging of people choice*).

Variabel investasi dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni investasi dari dalam negeri dan investasi dari luar negeri. Pada tabel menampilkan Kabupaten/Kota dengan realisasi PMA tertinggi dan terendah di Provinsi Jawa Timur. Data tersebut didapatkan berdasarkan nilai rata-rata kabupaten/kota dengan nilai realisasi PMA tertinggi dan terendah di Jawa Timur sehingga didapatkan masing-masing 5 kabupaten/kota dengan nilai realisasi PMA terendah dan tertinggi di Jawa Timur dengan satuan USD. Berikut merupakan perbandingan rata-rata realisasi PMA tertinggi dan terendah di Provinsi Jawa Timur.



Tabel 4.3. Tabel Perbandingan Rata-rata Realisasi PMA Tertinggi dan Terendah di Jawa Timur (2013-2017)

PMA Tertinggi		PMA Terendah	
Kab/Kota	Total USD	Kab/Kota	Total USD
Kab. Probolinggo	638141.04	Kab. Tulungagung	11.78
Kab. Gresik	436167.94	Kab. Pamekasan	5.4
Kab. Pasuruan	242419.3	Kab. Magetan	2
Kota Surabaya	228173.82	Kota Batu	0
Kab. Mojokerto	215395.32	Kab. Trenggalek	0

Sumber: BKPM, diolah

Pada Tabel 4.3 menunjukkan perbandingan rata-rata realisasi penanaman modal asing lima Kabupaten/Kota tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Peringkat pertama ditempati oleh Kabupaten Probolinggo dengan perolehan sebesar 638141.04 US\$ yang kemudian disusul oleh Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kota Surabaya dan Kabupaten Mojokerto. Jika dilihat dari nilai rata-rata PMA tertinggi ini didominasi oleh kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki prospek industry yang cukup tinggi. Sebaliknya nilai rata-rata realisasi penanaman modal asing terendah ditempati oleh 3 daerah yakni Kabupaten Magetan, Kota Batu dan Kabupaten Trenggalek yang masing-masing memiliki nilai 0.

Tabel 4.4. Tabel Perbandingan Realisasi PMDN Tertinggi dan Terendah di Jawa Timur (2013-2017)

PMDN Tertinggi		PMDN Terendah	
Kab/Kota	Total RP	Kab/Kota	Total RP
Kab. Gresik	10026701.1	Kab. Lumajang	803.02
Kota Surabaya	7364355.7	Kab. Sumenep	428.3
Kab. Tulungagung	6971022.12	Kab. Situbondo	0
Kab. Pasuruan	6300910.12	Kab. Pamekasan	0
Kab. Sidoarjo	4328644.94	Kota. Blitar	0

Sumber: BKPM, diolah

Pada Tabel 4.4 menampilkan Kabupaten/Kota dengan realisasi PMDN tertinggi dan terendah di Provinsi Jawa Timur. Data tersebut didapatkan



berdasarkan nilai rata-rata kabupaten/kota dengan nilai realisasi PMDN tertinggi dan terendah di Jawa Timur sehingga didapatkan masing-masing 5 kabupaten/kota dengan nilai realisasi PMDN terendah dan tertinggi di Jawa Timur dengan satuan Rupiah.

Pada tabel menunjukkan perbandingan rata-rata realisasi penanaman modal dalam negeri lima Kabupaten/Kota tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Peringkat pertama ditempati oleh Kabupaten Gresik dengan rata-rata nilai investasi PMDN sebesar 10026701.1 Milyar Rupiah yang kemudian disusul oleh Kota Surabaya, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Sidoarjo. Sebaliknya nilai rata-rata realisasi penanaman modal dalam negeri terendah ditempati oleh 3 daerah yakni Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pamekasan dan Kota Blitar yang masing-masing memiliki nilai 0.

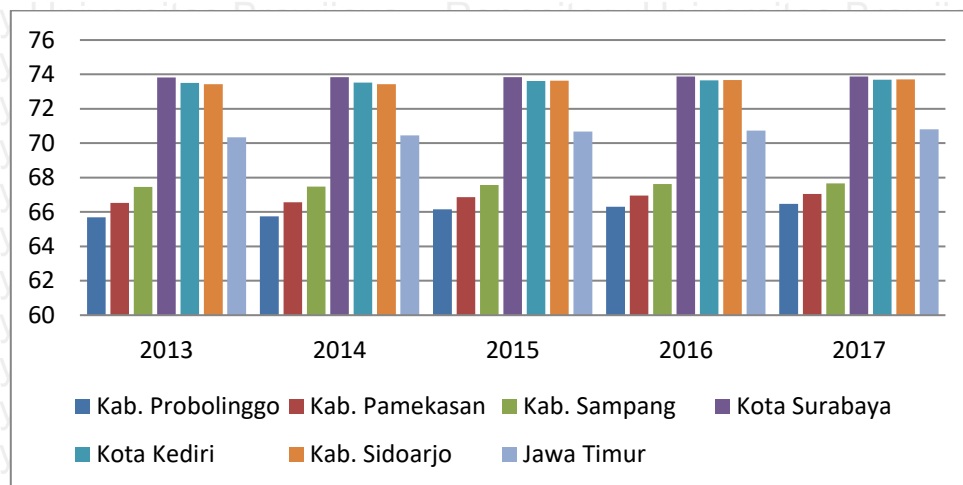
4.2.5. Kesehatan

Arsyad (2016) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin: kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi. Oleh karena, itu kesehatan yang baik akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan

Pada grafik berikut menampilkan perbandingan kabupaten/kota dengan angka harapan hidup tertinggi dan terendah di Provinsi Jawa Timur. Data tersebut didapatkan berdasarkan nilai rata-rata kabupaten/kota dengan angka harapan hidup

tertinggi dan terendah di Jawa Timur sehingga didapatkan masing-masing 5 kabupaten/kota dengan angka harapan hidup terendah dan tertinggi di Jawa Timur dengan satuan tahun. Berikut merupakan perbandingan angka harapan hidup tertinggi dan terendah di Provinsi Jawa Timur.

Grafik 4.5. Perbandingan Kabupaten/Kota dengan AHH Terendah dan Tertinggi di Jawa Timur (2013-2017)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Dalam Grafik diatas dapat kita lihat bahwa nilai angka harapan hidup cukup bervariasi dengan nilai terendah ditempati oleh Kabupaten Probolinggo dengan rata-rata angka harapan hidup sebesar 66,07 tahun kemudian disusul oleh Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang yang masing-masing sebesar 66,7 tahun dan 67,5 tahun angka ini masih dibawah rata-rata jawa timur yakni sebesar 71 tahun. Disamping itu ada kabupaten/kota dengan angka harapan hidup tertinggi yakni Kota Surabaya, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Sidoarjo yang masing-masing sebesar 73,8 tahun, 73,59 tahun, dan 73,57 tahun. Perbedaan angka harapan hidup ini dapat dipengaruhi berbagai faktor diantaranya kualitas SDM yang dapat mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat disuatu wilayah. Maka dari itu dalam penelitian



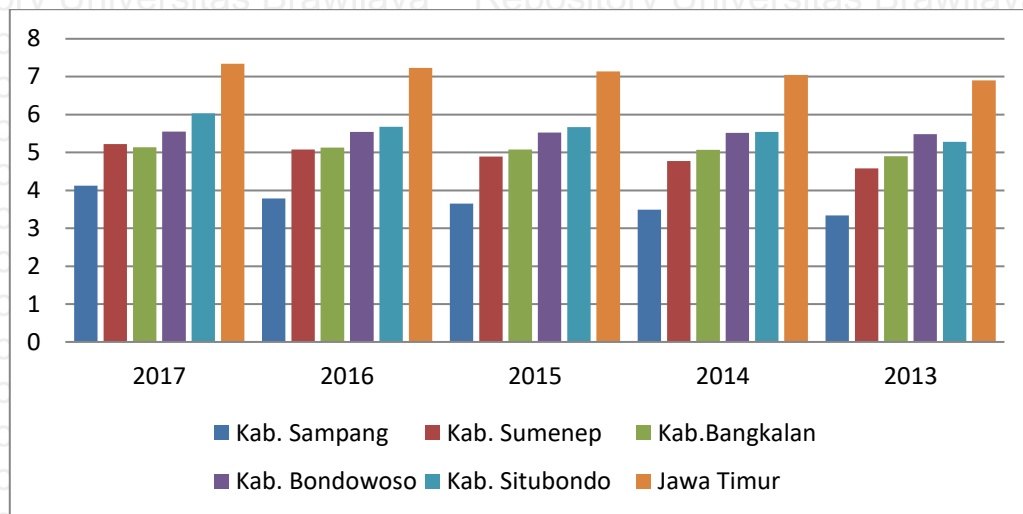
ini tingkat kesehatan dicerminkan dengan tingkat angka harapan hidup masyarakat di 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dalam satuan tahun.

4.2.6. Pendidikan

Menurut Kuznets dalam Todaro (2011) pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Todaro menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah pada dasarnya selalu mengupayakan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayahnya. Salah satu hal yang selalu diperhatikan adalah kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan ujung tombak dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan mempengaruhi pembangunan di suatu wilayah. Namun sayangnya di Provinsi Jawa Timur sendiri masih ditemukan beberapa wilayah kabupaten/kota dengan rata-rata lama sekolah yang cenderung rendah, Pada grafik menampilkan Kabupaten/Kota dengan tingkat rata-rata lama sekolah tertinggi dan terendah di Provinsi Jawa Timur. Data tersebut didapatkan berdasarkan nilai rata-rata kabupaten/kota dengan tingkat rata-rata lama sekolah tertinggi dan terendah di Jawa Timur sehingga didapatkan masing-masing 5 kabupaten/kota dengan tingkat rata-rata lama sekolah terendah dan tertinggi di Jawa Timur dengan satuan tahun. Berikut merupakan grafik rata-rata lama sekolah terendah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2013-2017.



Grafik 4.6. RLS Terendah Kabupaten/Kota di Jawa Timur (2013-2017)

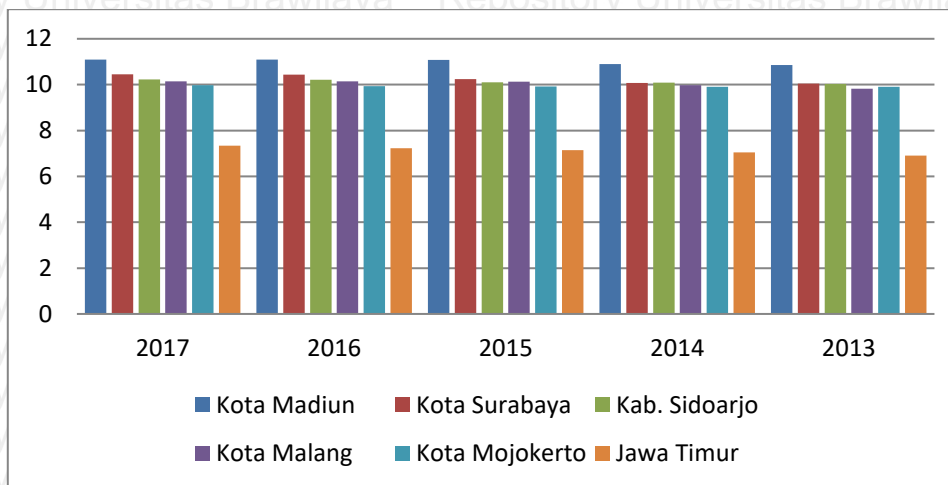


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Berdasarkan Grafik 4.6.diatas dapat dilihat untuk nilai rata-rata lama sekolah terendah didominasi oleh kabupaten/kota di Pulau Madura. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terlihat dalam grafik rata-rata lama sekolah diatas dimana Kabupaten Sampang menempati posisi terendah yakni hanya berkisar 3 sampai 4,12 tahun saja. Kemudian disusul dengan Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Sampang yang masing-masing memperoleh nilai rata-rata lama sekolah sebesar 4,5 hingga 5,2 tahun dan 4,9 hingga 5,1 tahun saja. Berbanding terbalik dengan grafik diatas berikut merupakan nilai rata-rata lama sekolah tertinggi kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2013-2017.



Grafik 4.7. RLS Tertinggi Kabupaten/Kota di Jawa Timur (2013-2017)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Berbeda dengan Grafik 4.6 sebelumnya, Grafik 4.7 memaparkan terkait kabupaten/kota di Jawa Timur dengan tingkat rata-rata lama sekolah tertinggi. Dari kelima kabupaten/kota dalam grafik terlihat bahwa setiap kabupaten/kota tersebut terbilang melampaui rata-rata lama sekolah di Jawa Timur kabupaten/kota tersebut ialah Kota Madiun, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, dan Kota Mojokerto. Untuk rata-rata lama sekolah tertinggi ditempati oleh Kota Mojokerto yakni selama 10,8 hingga 11,1 tahun. Untuk wilayah lain berkisar antara 7 hingga 10,5 tahun. Dalam penelitian ini pendidikan dilihat dari nilai rata-rata lama sekolah di kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur dalam satuan tahun.

4.3. Hasil Statistik

4.3.1. Analisis Deskriptif Variabel

Analisis deskriptif yang digunakan mengacu pada analisis statistik deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan, meringkas, menyederhanakan, mengorganisasi dan menyajikan data secara statistik ke dalam bentuk yang lebih teratur dan



sederhana agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Obyek penelitian berjumlah 190 data yang terdiri dari data *cross section* sebanyak 38 Kabupaten/Kota dan data *time series* sebanyak 5 tahun.

Tabel 4.5.
Statistik Deskriptif

	Obs.	Mean	Std. Dev.	Minimal	Maksimal
Kemiskinan	190	12.0752	4.93216	4.165245	27.17025
PDRB	190	5.299	1.792509	-2.73	18
Konsumsi	190	50.23311	8.618001	35	65
PMA	190	2.684208	1.965072	0	4.85203
PMDN	190	2.504644	1.980423	0	4.804021
Kesehatan	190	85.14211	46.89215	65.30	73.69
Pendidikan	190	82.76316	46.35248	3.34	11.10

Sumber: Output STATA (diolah)

Berdasarkan tabel statistik deskriptif pada Tabel 4.5. diatas terkait jumlah observasi, mean, standar deviasai, nilai minimum, dan nilai maksimum masing-masing variabel. Dapat dilihat seluruh variabel memiliki nilai mean yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar deviasi. Dimana standar deviasi merupakan cerminan dari rata-rata penyimpangan dari mean. yang berarti bahwa sebaran data tidak terlalu acak dan sebaran datanya dapat di toleransi.

4.3.2. Penentuan Model Analisis

4.3.2.1. Likelihood Ratio Test (Chow Test)

Likelihood Ratio Test (Chow Test) dilakukan untuk mengetahui apakah model akan dianalisis dengan menggunakan metode *pooled least square* atau *fixed effect*.

Uji *Likelihood Ratio (Chow Test)* yang menghasilkan nilai Prob. Lebih kecil dari $\alpha =$



0,05 akan menghasilkan keputusan bahwa metode *Fix Effect Model* signifikan dalam menguji data panel, dan begitupun sebaliknya. Uji ini dilakukan dengan prosedur uji F-stat dengan hipotesis:

H_0 : Model *Pooled Least Square* (restricted)

H_1 : Model *Fixed Effect* (unrestricted)

Hasil dari *Likelihood Ratio Test* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Hasil Pengujian Likelihood Ratio Test (Chow Test)

Model	Prob.	Hasil
Kemiskinan	0.0000	FEM

Sumber: Output STATA (diolah).

4.3.2.2. Hausman Test

Hasil dari uji *Likelihood Ratio Test* (Chow Test) yang signifikan dilanjutkan dengan uji *Hausman* untuk memilih model pendekatan yang terbaik antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pengujian ini mengikuti distribusi *chi-square* dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Model *Random Effect*

H_1 : Model *Fix Effect* (unrestricted)

Tabel 4.7.
Hasil Pengujian Hausman

Model	Prob.	Hasil
Kemiskinan	0.0000	FEM

Sumber: Output STATA (diolah).

4.3.3. Analisis Model Panel

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan software *STATA*. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab III mengenai metodologi penelitian, bahwasannya penelitian ini akan membahas



mengenai pengaruh PDRB, konsumsi, PMA, PMDN, kesehatan dan pendidikan terhadap kemiskinan..

Dalam penelitian ini, digambarkan bahwa model dari variabel PDRB (X_1), Konsumsi (X_2), PMA (X_3), PMDN (X_4), Pendidikan (X_5), Kesehatan (X_6), dan dampaknya terhadap Kemiskinan (Y). Hasil analisis *panel data* akan digunakan untuk melihat pengaruh antar variabel dengan melihat taraf signifikansi antar variabel, serta hubungan antar variabel. Untuk melihat seberapa besar pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen maka dapat dilihat dari besarnya *R-squared*. Sedangkan untuk melihat taraf signifikansi antar variabel, maka akan digunakan nilai Prob. Jika nilai Prob. lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka dapat dinyatakan terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai Prob. lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian jika nilai t-statistik (t-hitung) lebih besar dari t-tabel maka pengaruh antar variabel adalah signifikan, begitupun sebaliknya. Berikut merupakan tabel hasil pengujian model kemiskinan.

Tabel 4.8.
Hasil Pengujian Model Kemiskinan (Fixed Effect Model)

Dependent Variable: POV					Arah	Signifikansi
Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.		
Konsumsi	-.0102842	.0065874	-1.56	0.121	Negatif	Tidak Signifikan
PMA	-.001021	.0133056	-0.08	0.939	Negatif	Tidak Signifikan
PMDN	-.0044134	.0095982	-0.46	0.646	Negatif	Tidak Signifikan
Kesehatan	-.0461986	.0072954	-6.33	0.000	Negatif	Signifikan
Pendidikan	-.0035081	.0026824	-1.31	0.193	Negatif	Tidak Signifikan
PDRB	-.0261621	.0228064	-0.27	0.031	Negatif	Signifikan
Cons	16.87304	.69907	24.14	0.000	Positif	Signifikan
R-squared	0.4014					
Adjusted R-squared	0.3996					



Hettest	0.1418
Mean VIF	4.97
Prob (F-statistic)	0.000

Sumber: Output STATA (diolah).

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dilihat bahwasannya nilai t-statistic variabel konsumsi terhadap variabel kemiskinan sebesar -1.56 dengan nilai probabilitas sebesar 0.121 dan koefisien sebesar -.0102842 Berdasarkan nilai probabilitasnya dimana hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai probabilitas adalah sebesar 0.121 atau lebih besar dari $\alpha=0,05$ maka variabel konsumsi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan. Selanjutnya, untuk variabel PMA terhadap variabel kemiskinan menunjukkan t-statistic sebesar -0.08 dengan nilai probabilitas sebesar 0.939 dan koefisien sebesar -.001021. Berdasarkan nilai probabilitasnya dimana hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai probabilitas adalah sebesar 0.939 atau lebih besar dari $\alpha=0,05$ maka variabel PMA memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan. Kemudian untuk variabel PMDN memiliki nilai t-statistic sebesar -0.46 dengan nilai probabilitas sebesar 0.646 dan koefisien sebesar -.0044134. maka hasil perhitungan menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha=0,05$ maka variabel PMDN memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan. Kemudian untuk variabel kesehatan memiliki nilai t-statistic sebesar -6.33 dengan nilai probabilitas sebesar 0.000 dan koefisien sebesar -.0461986 maka hasil perhitungan menunjukkan nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha=0,05$ maka variabel kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Sama halnya dengan variabel pendidikan yang memiliki nilai t-statistic sebesar -1.31 dengan nilai probabilitas sebesar 0.193 dan koefisien sebesar -.0035081 maka hasil



perhitungan menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha=0,05$ maka variabel pendidikan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan. Terakhir untuk variabel Laju PDRB memiliki nilai t-statistic sebesar -0.27 dengan nilai probabilitas sebesar 0.031 dan koefisien sebesar -0.0261621 maka hasil perhitungan menunjukkan nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha=0,05$ maka variabel PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan.

Dalam regresi persamaan kemiskinan dihasilkan angka untuk R-squared sebesar 0.4014 yang artinya variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 40.14%. Sedangkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan hasil 0.1418 yang artinya tidak ada heteroskedastisitas didalam model dan yang terakhir untuk multikolinearitas menunjukkan hasil mean 4.97. Sehingga dari hasil regresi berganda pada persamaan kemiskinan terbentuklah persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kemiskinan}_{it} = & 16.87304 - 0.0261621 \text{ PDRB}_{it} - 0.0102842 \text{ Konsumsi}_{it} - \\ & 0.001021 \text{ lnPMA}_{it} - 0.0044134 \text{ lnPMDN}_{it} - 0.0461986 \\ & \text{Kesehatan}_{it} - 0.0035081 \text{ Pendidikan}_{it} - e_i \end{aligned}$$

4.3.4. Uji Statistik

4.3.3.1. Uji Parsial (Uji t)

Analisis secara parsial digunakan untuk melihat signifikansi dari masing-masing variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat pada model dengan menggunakan uji t, dimana hipotesis nol ($H_0 : \beta = 0$) artinya nilai koefisien sama dengan nol, sedangkan hipotesis alternatif adalah ($H_1 : \beta \neq 0$) yang artinya nilai koefisien berbeda dengan nol. Signifikansi ini secara langsung dapat dilihat dari besarnya angka probabilitas. Jika *p-value* (*t-statistic*) lebih kecil dari $\alpha =$



0,05 maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tolak H_0 , begitupun sebaliknya.

Jika dilihat pada Tabel 4.8 maka secara keseluruhan dapat di tarik kesimpulan bahwa terdapat 2 variabel independen dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu variabel kesehatan dan variabel PDRB yang artinya kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan, untuk variabel konsumsi, PMA, PMDN, pengeluaran pemerintah, populasi dan pendidikan memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Itu artinya, variabel-variabel tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemiskinan.

4.3.3.2. Uji Simultan (Uji f)

Uji f menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan kedalam model memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan ukuran derajat kepercayaan yang telah ditentukan ($\alpha = 0,05$). Jika probabilitas *f-statistic* memiliki nilai dibawah $\alpha = 0,05$ maka model akan diterima, sedangkan jika nilai probabilitas *f-statistic* memiliki nilai diatas $\alpha = 0,05$ maka model akan ditolak.

Hasil pengujian persamaan kemiskinan dengan menggunakan *Fixed Effect Model* menunjukkan didalam model tersebut memiliki nilai probabilitas *f-statistic* sebesar $0.00000 < 0.05$. yang artinya model tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen di tiap model memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen di masing-masing model. Dengan kata lain bahwa pada model kemiskinan variabel konsumsi, PMA, PMDN, kesehatan, pendidikan dan PDRB secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kemiskinan.

4.3.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)



Koefisien determinasi atau R^2 merupakan suatu ukuran yang menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Atau dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa besarkah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil pengujian pada model kemiskinan dimana variabel konsumsi, PMA, PMDN, kesehatan, pendidikan dan PDRB terhadap kemiskinan memiliki nilai *R-squared* sebesar 0.4014 atau koefisien determinasi sebesar 40.14%. Artinya semua variabel independen yang digunakan memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 40.14%.

4.4. Pembahasan

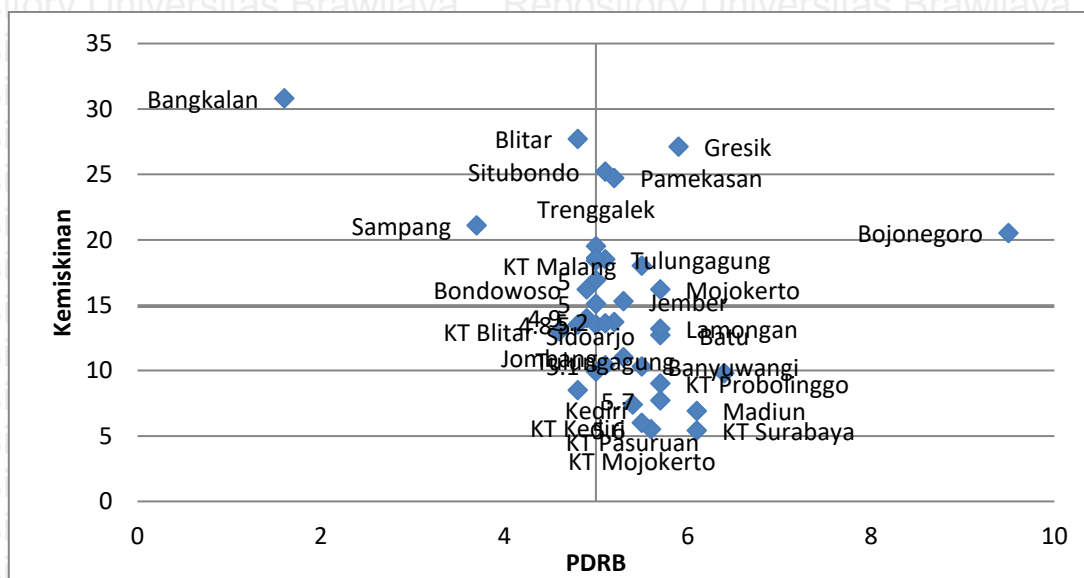
4.4.1. Pengaruh Laju PDRB Terhadap Kemiskinan

Indikator agregat ekonomi makro yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Teori trickle-down effect menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya kependuduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya

Dengan demikian, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa laju PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan pada laju PDRB maka akan terjadi penurunan pada kemiskinan secara signifikan. Hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Kuznet dalam Tulus Tambunan, 2001), dimana pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah penduduk miskin akan berangsur-angsur berkurang. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian yang mana PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Gambar 4.2. Sebaran Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Berdasarkan PDRB dan Kemiskinan (2013-2017)



Sumber: BPS, diolah



Sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 4.2. terlihat bahwa terdapat kecenderungan wilayah dengan laju PDRB rendah memiliki angka kemiskinan yang cenderung tinggi begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan hasil regresi yang sebelumnya peneliti lakukan. Dalam kurun waktu 5 tahun yakni pada tahun (2013-2017) nilai laju PDRB Jawa Timur cenderung mengalami tren penurunan namun hal ini masih terbilang tinggi jika dibandingkan dengan laju PDRB nasional.

Penelitian ini didukung dengan beberapa penelitian terdahulu, penelitian pertama yang sejalan dengan hasil dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh (Nail Lee dan Paul, 2016) dimana Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan erat dalam pengentasan kemiskinan, disaat pertumbuhan ekonomi tinggi maka tingkat kemiskinan akan menurun seiring dengan perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi. Serta penelitian (Alberto, 2011) dimana Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang rendah memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Mexico dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Yang terakhir penelitian yang sejalan dengan hasil dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh (*United Nation Development Program*, 2011) yang menyatakan bahwa kualitas dari pembangunan manusia dapat mengalami peningkatan apabila didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diimbangi dengan pemerataan pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi akan sangat efektif untuk memperbaiki tingkat kemiskinan serta pembangunan ekonomi.

Berdasarkan gambar diatas berikut merupakan klasifikasi kabupaten atau kota di Jawa Timur berdasarkan hubungan laju PDRB dan Kemiskinan.

Tabel 4.9. Kelompok Hubungan Laju PDRB dan Kemiskinan Menurut Kab/Kota

PDRB ↑ KM ↓	PDRB ↓ KM ↑	PDRB ↑ KM ↑	PDRB ↓ KM ↓
Kab. Lamongan	Kab. Blitar	Kab. Jember	Kota Blitar
Kab. Banyuwangi	Kab. Sampang	Kab. Nganjuk	Kab. Jombang
Kota Batu	Kab. Bangkalan	Kab. Tulungagung	Kab. Magetan
Kota Probolinggo	Kab. Lumajang	Kota Malang	
Kab. Madiun	Kab. Sumenep	Kab. Trenggalek	
Kota Surabaya		Kab. Pamekasan	
Kota Pasuruan		Kab. Gresik	
Kota Mojokerto		Kab. Bojonegoro	
Kota Kediri		Kab. Situbondo	
Kab. Kediri		Kab. Bondowoso	
Kab. Sidoarjo		Kab. Malang	
Kab. Ngawi		Kab. Probolinggo	
Kab. Mojokerto		Kab. Tuban	
Kab. Ponorogo			
Kab. Pacitan			
Kab. Pasuruan			
Kota Madiun			

Sumber: Penulis, 2020

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa rata-rata wilayah Jawa Timur yang memiliki laju PDRB tinggi memiliki tingkat kemiskinan yang cenderung rendah namun tidak dipungkiri terdapat beberapa wilayah kabupaten atau kota yang memiliki laju PDRB tinggi namun masih dibarengi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi pula seperti Kabupaten Gresik dan Kabupaten Bojonegoro. Jika ditinjau dari kesamaan wilayah keduanya merupakan kabupaten yang cukup banyak sentra perindustriannya namun hal tersebut tidak serta merta menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Tidak hanya itu di wilayah Jawa Timur juga masih ditemukan wilayah kabupaten atau kota yang memiliki laju PDRB rendah diikuti dengan tingkat kemiskinan yang rendah yakni Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri dan Kota Blitar. Sama halnya dengan Kabupaten Gresik dan Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sidoarjo merupakan kawasan industri di



Jawa Timur namun hal ini tidak cukup dalam meningkatkan laju PDRB wilayah meskipun tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo cenderung rendah.

4.4.2. Pengaruh Konsumsi Terhadap Kemiskinan

Tingkat konsumsi adalah cerminan daya beli masyarakat di suatu wilayah dimana daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya, dalam bentuk barang maupun jasa. dengan demikian jika terjadi peningkatan daya beli secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut (IPM 2007-2008, BPS Jakarta). Terjadinya perbedaan pola konsumsi masyarakat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya tingkat pendapatan, selera konsumen, harga barang, tingkat pendidikan, jumlah keluarga, dan lingkungan sekitar (Sukirno, 2011). Wilayah perkotaan cenderung memiliki tingkat konsumsi kelompok makanan yang rendah hal ini tidak serta-merta mencerminkan tingkat pendapatan wilayah perkotaan yang rendah melainkan terjadinya perubahan pola konsumsi dimana wilayah perkotaan cenderung mengkonsumsi barang dan jasa lain diluar kelompok makanan. Maka dari itu tinggi rendahnya daya beli tidak serta-merta dapat memperbaiki angka kemiskinan hal ini dikarenakan wilayah dengan rata-rata pendapatan perkapita yang rendah cenderung mendapatkan bantuan dari pemerintah yang bersifat jangka pendek dan menengah sehingga hal ini yang menimbulkan suatu wilayah dengan tingkat konsumsi yang tinggi tetapi dibarengi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi pula.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa Konsumsi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa jika terjadi peningkatan pada tingkat konsumsi maka



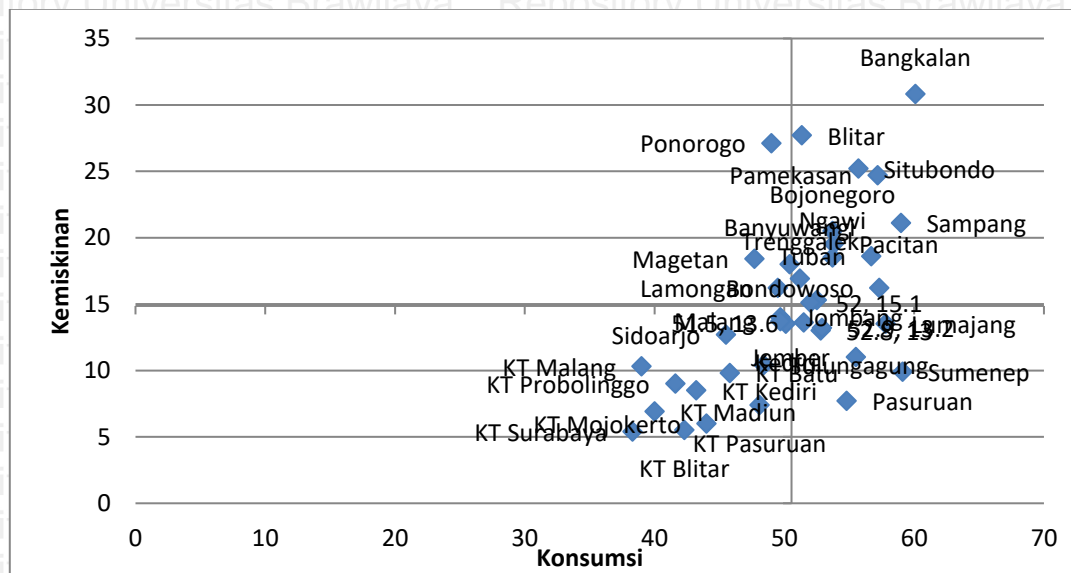
akan menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur namun tidak secara signifikan. Konsumsi yang tinggi dapat terjadi jika masyarakat Jawa Timur memiliki pendapatan yang tinggi pula, pendapatan memiliki peranan penting dalam tingkat konsumsi masyarakat dimana tingkat pendapatan yang tinggi akan akan mempengaruhi berbagai hal salah satunya adalah penurunan tingkat kemiskinan.

Hasil temuan (Gan, 2013) menunjukkan bahwa pada tahun 2008 di China terjadi peningkatan kemiskinan yang mana hal tersebut disebabkan karena menurunnya konsumsi yang dilakukan masyarakat. Demikian pula pada hasil penelitian (Hurd, 2006) menyatakan bahwa di Cambridge terjadi peningkatan kemiskinan ketika masyarakatnya mengalami kesulitan dalam mengkonsumsi kebutuhan hidupnya.

Dalam penelitian ini konsumsi berpengaruh negatif dan tidak signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Sejalan dengan temuan dari (Moav, 2008) yang menyatakan bahwa konsumsi yang dilakukan oleh warga London memiliki peranan penting dalam perekonomian. Pada suatu periode terjadi peningkatan konsumsi di London yang mengakibatkan penurunan jumlah penduduk miskin namun tidak signifikan dikarenakan terjadi perbedaan pola konsumsi masyarakat dan kecenderungan masyarakat dalam penggunaan barang impor. Serupa dengan penelitian (Abdul R, 2019) dimana konsumsi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap masyarakat migran di Kota Makassar. Fenomena ini terjadi karena perbedaan pola konsumsi antara masyarakat migran dengan masyarakat asli Kota Makassar sehingga tidak terjadi signifikansi dalam pengurangan kemiskinan oleh konsumsi. Penelitian serupa juga mengatakan bahwa konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, namun berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jakarta hal tersebut diduga terjadi karena terdapat faktor lain yang lebih dominan dalam pengurangan

kemiskinan (Handayani, 2013). Berikut merupakan gambar sebaran hubungan konsumsi dan kemiskinan di Jawa Timur.

Gambar 4.3. Sebaran Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Berdasarkan Konsumsi dan Kemiskinan (2013-2017)



Sumber: BPS, diolah

Pada Gambar 4.3. terlihat bahwa wilayah di Jawa Timur memiliki tingkat konsumsi yang berbeda-beda pengaruhnya terhadap kemiskinan. Ada beberapa wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi memiliki angka kemiskinan yang cenderung tinggi pula begitu juga sebaliknya. Namun juga ditemukan beberapa wilayah dengan tingkat konsumsi yang rendah cenderung memiliki angka kemiskinan yang tinggi, Tingkat variasi hubungan antara konsumsi dan kemiskinan yang tinggi inilah yang mengakibatkan kurangnya signifikansi hubungan antara konsumsi dan kemiskinan di Jawa Timur. Berikut merupakan klasifikasi wilayah berdasarkan hubungan tingkat konsumsi terhadap kemiskinan di Jawa Timur.



Tabel 4.10. Kelompok Hubungan Konsumsi dan Kemiskinan Menurut Kab/Kota

Konsumsi ↑ KM ↓	Konsumsi ↓ KM ↑	Konsumsi ↑ KM ↑	Konsumsi ↓ KM ↓
Kab. Lumajang	Kab. Ponorogo	Kab. Bangkalan	Kab. Malang
Kab. Sumenep	Kab. Magetan	Kab. Blitar	Kab. Sidoarjo
Kab. Pasuruan	Kab. Lamongan	Kab. Situbondo	Kab. Jember
Kab. Tulungagung	Kab. Bondowoso	Kab. Sampang	Kota Malang
Kab. Nganjuk	Kab. Tuban	Kab. Pacitan	Kota Probolinggo
Kab. Jombang		Kab. Ngawi	Kota Mojokerto
		Kab. Probolinggo	Kota Surabaya
		Kab. Kediri	Kota Pasuruan
		Kab. Madiun	Kota Blitar
		Kab. Pamekasan	Kota Madiun
		Kab. Bojonegoro	Kota Kediri
		Kab. Ponorogo	Kota Batu
		Kab. Banyuwangi	Kota Malang
		Kab. Trenggalek	

Sumber: Penulis, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa tingkat konsumsi cukup bervariasi dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Namun, jika ditinjau lebih dalam lagi, tingkat konsumsi dalam kelompok makanan tertinggi masih dipegang oleh wilayah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Situbondo dan lain sebagainya. Sebaliknya kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki tingkat konsumsi kelompok makanan yang rendah cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang rendah pula hal ini didominasi oleh wilayah perkotaan seperti Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto dan lain sebagainya.

4.4.3. Pengaruh Investasi (PMA dan PMDN) Terhadap Kemiskinan

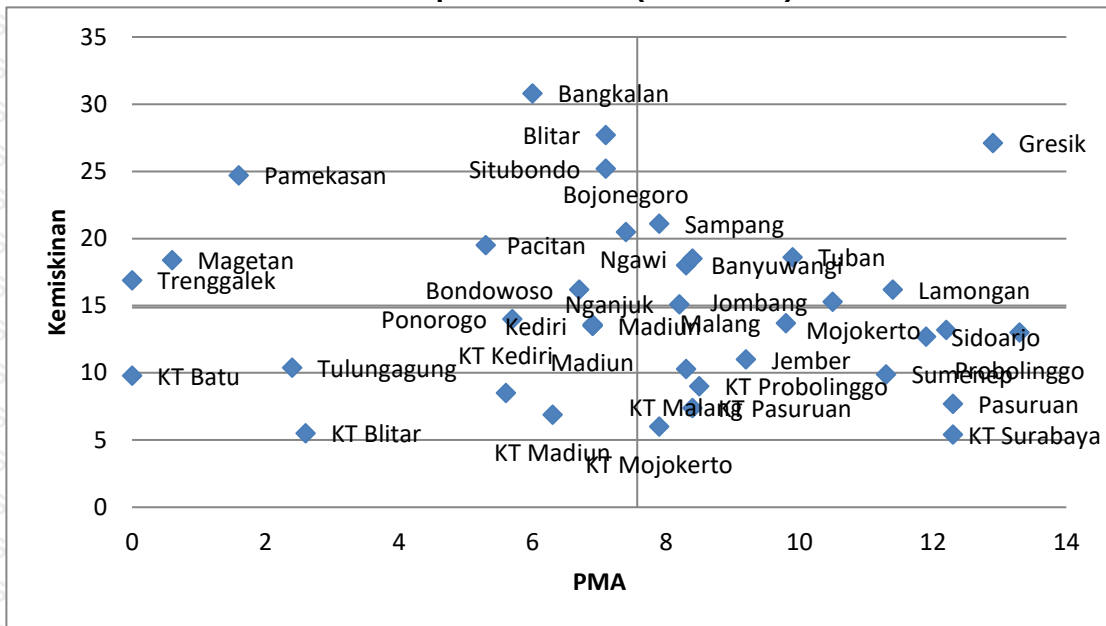
Daya saing antar wilayah dibutuhkan guna menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya ke daerah dengan minim investasi. Perbaikan infrastruktur, kemudahan birokrasi serta kepastian hukum merupakan beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam menarik minat para investor. Maka



dari itu pemerintah daerah dituntut untuk lebih tanggap dalam aspek-aspek tersebut, menurut undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, persoalan investasi menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk itu, Bupati/Wali Kota beserta jajarannya diharap mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif ini dapat dilakukan dengan terus melakukan pembangunan infrastruktur pendukung, mempermudah birokrasi serta bisa memberikan jaminan kepastian hukum baik mengenai permasalahan lahan ataupun permasalahan lainnya. Sehingga diperlukan kesiapan pemerintah daerah terhadap persoalan yang mungkin terjadi selama kegiatan investasi ini dilakukan, agar tidak terjadi upaya penolakan dari masyarakat yang pada akhirnya akan mengaruhi iklim investasi yang ada.

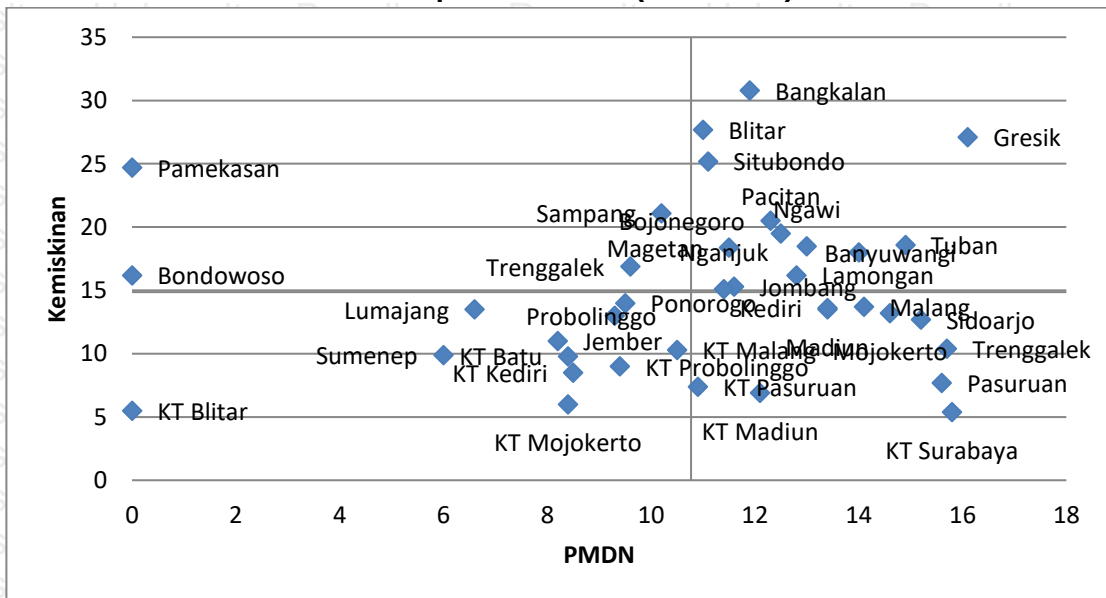
Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa variabel PMA dan PMDN memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Investasi sendiri merupakan penghubung yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Ocaya, Ruranga, & Kaberuka, 2012). Menurut Harrod-Domar, investasi merupakan kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, maka semakin tinggi pula investasi daerah tersebut (Fosu, 2010). Jawa Timur memiliki nilai investasi yang cenderung fluktuatif untuk tingkat kabupaten/kota, namun cenderung meningkat untuk tingkat provinsi. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di masing-masing daerah. Berikut merupakan gambar sebaran realisasi investasi baik PMA maupun PMDN berdasarkan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Gambar 4.4. Sebaran Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Berdasarkan PMA Terhadap Kemiskinan (2013-2017)



Sumber: BPS, diolah

Gambar 4.5. Sebaran Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Berdasarkan PMDN Terhadap Kemiskinan (2013-2017)



Sumber: BPS, diolah



Sebagaimana yang ditampilkan pada gambar 4.4. dan gambar 4.5 terlihat bahwa terdapat hasil yang bervariasi di setiap wilayah terkait hubungan variabel PMA dan kemiskinan serta hubungan variabel PMDN dan kemiskinan. Variasi yang tinggi ini yang menyebabkan kurangnya signifikansi variabel investasi dalam pengentasan kemiskinan. Dimana investasi tertinggi masih terpusat di wilayah sentral perekonomian Jawa Timur yakni Kota Surabaya dan sekitarnya seperti Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, dan Kab. Pasuruan serta daerah-daerah dengan potensi wilayah yang baik dan pusat-pusat perindustrian saja. PMA dan PMDN dapat berpengaruh negatif dan signifikan di beberapa wilayah terhadap kemiskinan jika dengan masuknya PMA dan PMDN berdampak pada pembukaan kesempatan kerja yang baru dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan namun hal ini harus berjalan secara terus-menerus atau jangka panjang agar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di suatu wilayah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah sepantasnya membuat langkah-langkah yang dapat ditempuh guna mendukung peningkatan investasi dalam pengentasan kemiskinan diantaranya: (i) Meningkatkan iklim investasi yang kondusif bagi terlaksananya berbagai proyek investasi dengan cara penyederhanaan birokrasi/proses pengurusan izin-izin dibarengi dengan keterpaduan koordinasi kebijakan investasi di tingkat pemerintah daerah, stabilitas ekonomi yang baik, penegakan supremasi hukum, penambahan dan perawatan infrastruktur serta keamanan. (ii) Dalam upaya menarik perhatian para investor untuk menginvestasikan modalnya ke Provinsi Jawa Timur, maka sistem informasi mengenai potensi daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur harus lebih ditingkatkan lagi mengingat di era otonomi daerah pembangunan lebih difokuskan di tingkat



Kabupaten /Kota. Adanya sistem informasi yang lengkap, mudah diakses dan relatif canggih tentang potensi daerah di Provinsi Jawa Timur akan membuka peluang investasi yang lebih besar. Berikut merupakan klasifikasi wilayah di Jawa Timur berdasarkan hubungan pengaruh investasi dan kemiskinan.

Tabel 4.11. Kelompok Hubungan PMA dan Kemiskinan Menurut Kab/Kota

PMA ↑ KM ↓	PMA ↓ KM ↑	PMA ↑ KM ↑	PMA ↓ KM ↓
Kota Surabaya	Kab. Nganjuk	Kab. Gresik	Kab. Madiun
Kab. Pasuruan	Kab. Bondowoso	Kab. Sampang	Kab. Kediri
Kab. Probolinggo	Kab. Trenggalek	Kab. Banyuwangi	Kab. Ponorogo
Kab. Sumenep	Kab. Magetan	Kab. Tuban	Kab. Tulungagung
Kab. Sidoarjo	Kab. Pamekasan	Kab. Jombang	Kota Blitar
Kab. Mojokerto	Kab. Bangkalan	Kab. Lamongan	Kota Batu
Kab. Jember	Kab. Blitar		Kota Madiun
Kota Mojokerto	Kab. Situbondo		Kota Kediri
Kota Malang	Kab. Bondowoso		Kota Pasuruan
Kota Probolinggo	Kab. Ngawi		Kab. Lumajang
Kab. Malang	Kab. Pacitan		

Sumber: Penulis, 2020

Tabel 4.12. Kelompok Hubungan PMDN dan Kemiskinan Menurut Kab/Kota

PMDN ↑ KM ↓	PMDN ↓ KM ↑	PMDN ↑ KM ↑	PMDN ↓ KM ↓
Kota Surabaya	Kab. Trenggalek	Kab. Bangkalan	Kota Blitar
Kab. Pasuruan	Kab. Sampang	Kab. Blitar	Kota Mojokerto
Kab. Trenggalek	Kab. Bondowoso	Kab. Situbondo	Kota Probolinggo
Kab. Sidoarjo	Kab. Pamekasan	Kab. Gresik	Kab. Jember
Kab. Malang		Kab. Pacitan	Kab. Ponorogo
Kab. Lamongan		Kab. Ngawi	Kab. Lumajang
Kab. Kediri		Kab. Nganjuk	Kab. Sumenep
Kab. Jombang		Kab. Bojonegoro	Kota Kediri
Kab. Mojokerto		Kab. Megetan	Kota Malang
Kota Pasuruan		Kab. Banyuwangi	Kab. Probolinggo
Kota Madiun		Kab. Tuban	
Kab. Madiun		Kab. Magetan	

Sumber: Penulis, 2020

Berdasarkan tabel diatas secara umum investasi PMA dan PMDN memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Jika ditinjau lebih dalam lagi PMA dan PMDN cenderung terfokus pada daerah kawasan industri serta pusat



perekonomian seperti Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Kediri. Kemudian daerah dengan potensi wilayah yang minim seperti Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Bangkalan cenderung memiliki nilai investasi yang rendah. Dengan minimnya nilai investasi tersebut akan mempengaruhi tingkat kemiskinan, meskipun ditemukan beberapa daerah dengan tingkat investasi rendah namun dibarengi dengan tingkat kemiskinan yang rendah pula seperti Kota Malang, Kota Kediri, dan Kota Blitar.

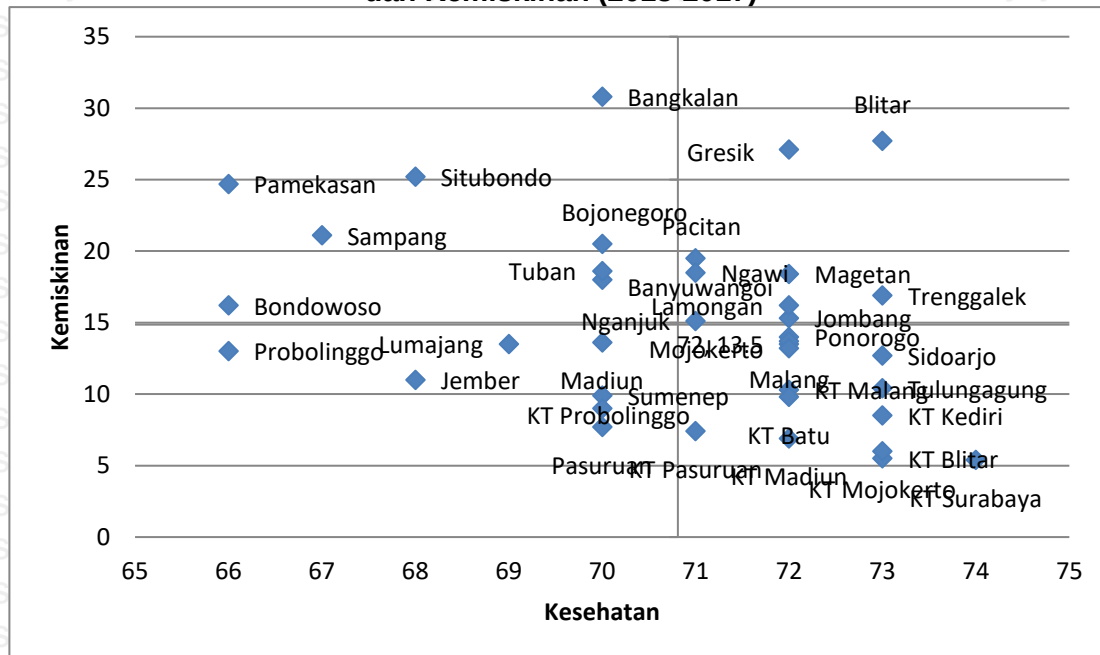
4.4.4. Pengaruh Kesehatan Terhadap Kemiskinan

Dalam undang-undang No 36 tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Beberapa ekonom beranggapan bahwa kesehatan merupakan fenomena ekonomi yang dapat dinilai dari stok maupun juga dinilai sebagai investasi sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai suatu faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat, yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa Kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan pada kesehatan maka akan terjadi penurunan pada tingkat kemiskinan secara signifikan. Dalam penelitian ini variabel kesehatan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai proksi penelitian. Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam menyukkseskan

pembangunan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Masyarakat yang memiliki tingkat kesehatan yang baik akan memiliki tingkat produktivitas kerja yang tinggi, tingkat pendapatan tinggi, tingkat pendidikan tinggi dan sejumlah hal positif lainnya.

Gambar 4.6. Sebaran Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Berdasarkan Kesehatan dan Kemiskinan (2013-2017)



Sumber: BPS, diolah

Pada Gambar 4.6. terlihat bahwa kesehatan dan kemiskinan memiliki pengaruh yang bervariasi di setiap wilayah. Secara umum tingkat kesehatan rendah memiliki angka kemiskinan yang cenderung tinggi begitu pula sebaliknya. Kesehatan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di suatu wilayah (Arsyad, 2016) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Sejalan dengan penelitian tersebut (Pervez dan Usman, 2014) mengatakab bahwa *income growth* dan pertumbuhan ekonomi tidak terlalu



signifikan dalam pengentasan kemiskinan hal ini berbanding terbalik dengan kesehatan dan pendidikan yang memiliki pengaruh negative dan signifikan dalam pengentasan kemiskinan.

Salah satu faktor yang mendasari signifikansi kesehatan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin dimana, kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi. Oleh karena, itu kesehatan yang baik akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Maka dari itu peran pemerintah Jawa Timur dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Jawa Timur diperlukan, hal ini guna meningkatkan produktifitas masyarakat itu sendiri. Peningkatan pelayanan kesehatan merupakan suatu kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah karena masih ditemukan kasus-kasus pelayanan kesehatan yang kurang baik di Jawa Timur. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah dapat bertindak adil dan tegas terhadap pelayanan kesehatan yang sedang berlangsung di wilayah Jawa Timur karena pada dasarnya kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.13. Kelompok Hubungan Kesehatan dan Kemiskinan Menurut Kab/Kota

KES ↑ KM ↓	KES ↓ KM ↑	KES ↑ KM ↑	KES ↓ KM ↓
Kota Surabaya	Kab. Bangkalan	Kab. Blitar	Kab. Probolinggo
Kota Blitar	Kab. Situbondo	Kab. Gresik	Kab. Lumajang
Kota Mojokerto	Kab. Bojonegoro	Kab. Pacitan	Kab. Jember
Kota Madiun	kab. Tuban	Kab. Ngawi	Kab. Madiun
Kota Pasuruan	Kab. Sampang	Kab. Magetan	Kota Probolinggo
Kab. Malang	Kab. Pamekasan	Kab. Trenggalek	Kab. Pasuruan
Kab. Tulungagung	Kab. Bondowoso	Kab. Banyuwangi	Kab. nganjuk
Kab. Sidoarjo		Kab. Lamongan	
Kab. Ponorogo		Kab. Jombang	
Kab. Malang			
Kab. Mojokerto			
Kab. Ponorogo			



Secara umum tingkat kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Dalam tabel diatas terlihat bahwa wilayah dengan tingkat kesehatan yang tinggi seperti Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Mojokerto dan lain sebagainya cenderung memiliki angka kemiskinan yang rendah. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pacitan dan lainnya yang meskipun tingkat kesehatan di wilayah tersebut cenderung tinggi dibarengi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi pula. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

4.4.5. Pengaruh Pendidikan Terhadap Kemiskinan

Menurut definisi baru, kemiskinan bukan hanya sekedar masalah kesenjangan pendapatan (*income discrepancy*), tetapi menyangkut ketidakberdayaan (*incapability*), ketiadaan pengetahuan dan keterampilan (*lack Of knowledge and skills*) dan kelangkaan akses pada modal dan sumber daya (*scarcity of capital and resource*). (Alhumani, 2006), atau *human capability* (Sen, 2000). Elemen dasar human capability adalah pendidikan yang memainkan peranan sentral dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dengan pendidikan yang baik, setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, dari menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Yang pada akhirnya pendidikan dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menghilangkan eksklusi sosial, untuk kemudian meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur.



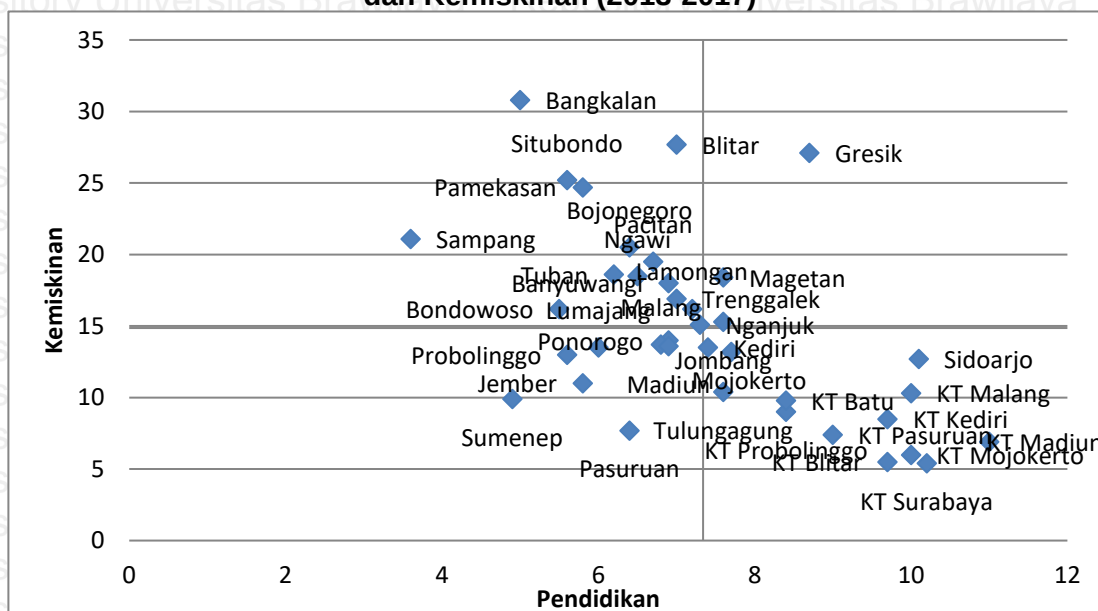
Yang berarti bahwa apabila terjadi peningkatan pada tingkat pendidikan akan menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur namun tidak secara signifikan. Hal ini cukup unik, karena pada dasarnya pendidikan merupakan variabel penting dalam pembentukan modal manusia. Dalam berbagai penelitian pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, pendidikan diakui secara luas bahwa memiliki peran sebagai pemimpin dalam instrumen pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pendidikan semakin dikembangkan. Beberapa tahun lalu pendidikan hanya dipusatkan pada pendidikan dasar dan menengah. Namun, saat ini pendidikan telah dikembangkan hingga pendidikan tinggi. Hal tersebut dilakukan karena pendidikan mampu memperbaiki kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan secara signifikan (Bloom, 2006).

Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan diberbagai negara dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada waktunya akan meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi angka kemiskinan (Arsyad, 2010). Signifikansi pendidikan dalam pengurangan kemiskinan dapat berbeda-beda disetiap wilayah hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal salah satunya ialah kurang meratanya akses pendidikan dan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Terlebih lagi masih banyak ditemukan wilayah kabupaten/kota dengan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang rendah.

Pada Gambar 4.7. terlihat bahwa pendidikan dan kemiskinan memiliki pengaruh yang bervariasi disetiap wilayah dimana tingkat pendidikan rendah memiliki angka kemiskinan yang cenderung tinggi begitu pula sebaliknya. Namun

juga ditemukan beberapa wilayah dengan tingkat pendidikan tinggi namun tingkat kemiskinan juga tinggi. Hal ini cukup bervariasi di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini bahwa tingkat Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tertinggi didominasi oleh kabupaten/kota maju di Jawa Timur. seperti Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Mojokerto dan wilayah sekitar sentra perekonomian. Berikut merupakan gambar sebaran kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan pendidikan dan kemiskinan.

Gambar 4.7. Sebaran Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Berdasarkan Pendidikan dan Kemiskinan (2013-2017)



Sumber: BPS, diolah

Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia, kualitas sumberdaya manusia yang rendah akan mencerminkan produktivitas yang rendah, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat upah yang akan diperoleh.. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia disebabkan oleh rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan, serta munculnya kemiskinan diakibatkan oleh perbedaan akses modal setiap individu (Waluyo, 2013).



Di Jawa Timur sendiri tingkat rata-rata lama sekolah setiap tahunnya semakin meningkat hal ini cukup baik karena hal ini sejalan dengan penelitian (Amalia, 2012) dimana pendidikan merupakan jembatan menuju masa depan suatu bangsa. Karena pendidikan menyangkut karakter pembangunan dan pertahanan jati diri seseorang dalam suatu bangsa. Pendidikan juga akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan seseorang, dimana seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki peluang yang lebih tinggi dalam mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang tinggi pula.

Tabel 4.14. Kelompok Hubungan Pendidikan dan Kemiskinan Menurut Kab/Kota

PND ↑ KM ↓	PND ↓ KM ↑	PND ↑ KM ↑	PND ↓ KM ↓
Kota Surabaya	Kab. Bangkalan	Kab. Gresik	Kab. Ponorogo
Kota Mojokerto	Kab. Situbondo	Kab. Magetan	Kab. Probolinggo
Kab. Madiun	Kab. Pamekasan		kab. Jember
Kota Pasuruan	Kab. Bojonegoro		kab. Sumenep
Kota Kediri	Kab. Pacitan		Kab. Tulungagung
Kota Malang	Kab. Ngawi		Kab. Pasuruan
Kab. Sidoarjo	Kab. Sampang		
Kota Batu	Kab. Tuban		
Kota Probolinggo	Kab. Banyuwangi		
Kota Blitar	Kab. Bondowoso		
Kab. Mojokerto	Kab. Lumajang		
Kab. Kediri	Kab. Malang		
Kab. Jombang	Kab. Trenggalek		
Kab. Nganjuk	Kab. Blitar		
Kota. Madiun	Kab. Lamongan		

Sumber: Penulis, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa wilayah yang memiliki rata-rata lama sekolah yang tinggi cenderung memiliki angka kemiskinan yang rendah seperti Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Madiun, Kota Pasuruan dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan memiliki peranan penting dalam pembentukan SDM disuatu wilayah yang pada nantinya akan berpengaruh terhadap perekonomian di wilayah tersebut. Meskipun demikian masih ditemukan wilayah



dengan tingkat pendidikan yang tinggi dibarengi dengan angka kemiskinan yang tinggi pula wilayah tersebut ialah Kabupaten Gresik dan Kabupaten Magetan. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua kabupaten tersebut memiliki faktor lain yang lebih dominan dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

4.5. Kondisi Inklusivitas Pembangunan Di Jawa Timur

Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang menuntut partisipasi bagi semua pihak agar turut andil dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Sehingga ketika perekonomian tumbuh, maka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran akan menurun (Klasen, 2010). Saat ini timbul berbagai kekhawatiran terkait tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak terdistribusi secara merata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak tertentu (Resolution Foundation et al., 2013; Furman, 2014; OECD 2015, 2014). Pada dasarnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan tingkat pendapatan secara menyeluruh yang dengan demikian akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan (McCulloch, 2003; Partridge, 2008).

Terlepas dari tingginya tingkat laju PDRB Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir ini tidak serta-merta menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan angka kemiskinan Jawa Timur yang masih berada diatas rata-rata nasional yang mengindikasikan bahwa tingkat inklusivitas Provinsi Jawa Timur masih perlu ditingkatkan karena belum memberi manfaat lebih untuk masyarakat khususnya masyarakat miskin. Hal ini sejalan dengan penelitian (Dara Ayu, 2018) dimana Selama periode 2011-2015 indeks pertumbuhan inklusif di Jawa Timur memiliki tren yang menurun. Dimana aspek Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur lebih dominan, dibandingkan dengan aspek lainnya yaitu ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran.



Dalam penelitian ini menemukan bahwa seluruh variabel yakni laju PDRB, Konsumsi, PMA, PMDN, Kesehatan, dan Pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dalam mempengaruhi tingkat inklusivitas. Yang artinya seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap inklusivitas melalui kemiskinan. Terdapat dua variabel yakni PDRB dan Kesehatan yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur yang artinya dua variabel tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengurangan kemiskinan di Jawa Timur dalam peningkatan inklusivitas. Dari keseluruhan variabel penelitian, laju PDRB dan kesehatan sudah mencapai tingkat inklusivitas yang baik. Kemudian untuk variabel Konsumsi, PMA, PMDN, dan Pendidikan memiliki pengaruh yang negatif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan yang artinya keempat variabel tersebut belum mencapai percepatan inklusif yang maksimal. Maka dari itu diperlukan perhatian lebih oleh pemerintah terkait peningkatan signifikansi keempat variabel tersebut agar mencapai percepatan inklusif yang maksimal.

Kurang meratanya pembangunan di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur menjadi permasalahan utama dalam percepatan inklusif. Berdasarkan gambar sebaran hubungan keempat variabel tersebut terhadap kemiskinan mengindikasikan bahwa terdapat variasi yang tinggi hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan prioritas pembangunan yang ada di masing-masing daerah dimana, setiap daerah memiliki anggaran dan rancangan pembangunan daerah yang berbeda-beda. Upaya peningkatan percepatan inklusif yang baik selalu diiringi berbagai macam tantangan sehingga langkah pertama dalam upaya peningkatan pertumbuhan inklusif di berbagai wilayah memiliki perbedaan. Kebijakan fiskal merupakan salah satu upaya



pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan inklusif. Sejauh ini kebijakan pemerintah Jawa Timur dalam penurunan angka kemiskinan terbilang cukup baik karena angka kemiskinan di Jawa Timur dari tahun ketahun mengalami tren penurunan. Terlebih perekonomian Jawa Timur dicirikan dengan adanya wilayah yang maju dan yang tertinggal dimana pertumbuhan ekonomi di provinsi ini yang sebagian besar terkonsentrasi di wilayah Surabaya dan sekitarnya seperti Gresik dan Sidoarjo. Maka dari itu pemerintah perlu melihat hal ini sebagai kesempatan bagi kabupaten/kota lain di Jawa Timur untuk mulai terhubung ke daerah penggerak utama pertumbuhan (Shubham, 2011). Hal ini diharapkan dapat menstimulasi perekonomian daerah-daerah itu sendiri dalam meningkatkan inklusivitas serta pengurangan angka kemiskinan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil estimasi dan analisis yang telah dilakukan pada BAB IV, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Laju PDRB dan kesehatan mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara efektif dalam mengoptimalkan pembangunan inklusif di Jawa Timur. Kondisi secara umum Laju PDRB di 38 kabupaten/kota memiliki rata-rata yang cukup tinggi yakni sebesar 5,27% dimana persebaran hubungan Laju PDRB dan kemiskinan bersifat mengelompok (*clustered*) yang dipetakan dalam beberapa kategori diantaranya kabupaten/kota yang memiliki laju PDRB tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang rendah yakni Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, dan Kab. Madiun. Dari sini dapat dilihat bahwa laju PDRB erat kaitannya terhadap kemiskinan seperti teori yang disampaikan oleh kuzsnet. Meskipun demikian masih ditemukan beberapa wilayah dengan laju PDRB tinggi dibarengi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi pula diantaranya ialah Kab. Bojonegoro, Kab. Gresik, dan Kab. Mojokerto.

Kesehatan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki pengaruh negatif dan signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Sebagaimana dalam penelitian ini Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Kediri dan Kab. Sidoarjo memiliki tingkat kesehatan yang cukup tinggi dengan tingkat kemiskinan yang rendah. Hal ini membuktikan bahwa kesehatan memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam membentuk kualitas SDM karena kesehatan mempengaruhi tingkat fungsional seseorang, baik dari segi fisiologis, psikologis dan dimensi sosiokultural. Bersama dengan pendidikan,



kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Konsumsi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan dalam pengentasan kemiskinan di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur hal ini disebabkan oleh berubahnya pola konsumsi makanan masyarakat perkotaan di Jawa Timur dimana wilayah dengan konsumsi kelompok makanan yang tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi pula seperti Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan dan Kab. Trenggalek sedangkan Kabupaten/Kota dengan tingkat konsumsi kelompok makanan yang rendah seperti Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Batu dan Kota Blitar cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang rendah.

Terjadinya perbedaan pola konsumsi masyarakat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya tingkat pendapatan, selera konsumen, harga barang, tingkat pendidikan, jumlah keluarga, dan lingkungan sekitar. Wilayah perkotaan cenderung memiliki tingkat konsumsi kelompok makanan yang rendah hal ini tidak serta-merta mencerminkan tingkat pendapatan wilayah perkotaan yang rendah melainkan terjadinya perubahan pola konsumsi dimana wilayah perkotaan cenderung mengkonsumsi barang dan jasa lain diluar kelompok makanan. Maka dari itu tinggi rendahnya daya beli tidak serta-merta dapat memperbaiki angka kemiskinan hal ini dikarenakan adanya bantuan dari pemerintah yang bersifat jangka pendek dan menengah sehingga hal ini yang menimbulkan suatu wilayah dengan tingkat konsumsi yang tinggi tetapi dibarengi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi pula.



Investasi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan dalam pengentasan kemiskinan di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Investasi PMA maupun PMDN masih terpusat di Kabupaten/Kota sentra perekonomian dan wilayah perindustrian seperti Kota Surabaya, Kab. Gresik, Kab. Pasuruan dan Kab. Sidoarjo. Dari sini dapat kita lihat bahwa daerah lain yang berdaya saing rendah kurang mendapat perhatian para investor dalam menanamkan modalnya seperti Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Bangkalan, Kab. Bondowoso dan lainnya.

Daya saing antar wilayah dibutuhkan guna menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya ke daerah dengan minim investasi. Perbaikan infrastruktur, kemudahan birokrasi serta kepastian hukum merupakan beberapa upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam upaya menarik minat para investor. Maka dari itu pemerintah daerah dituntut untuk lebih tanggap dalam aspek-aspek tersebut, menurut undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, persoalan investasi menjadi kewenangan pemerintah daerah. Untuk itu, Bupati/Wali Kota beserta jajarannya diharap mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif ini dapat dilakukan dengan terus melakukan pembangunan infrastruktur pendukung, mempermudah birokrasi serta bisa memberikan jaminan kepastian hukum baik mengenai permasalahan lahan ataupun permasalahan lainnya

Pendidikan memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan dalam pengentasan kemiskinan di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur hal ini cukup unik karena pada dasarnya pendidikan merupakan pembentuk modal manusia yang cukup penting. Kurangnya signifikansi disebabkan oleh tingginya variasi rata-rata lama sekolah di wilayah Jawa Timur serta masih banyak ditemukan wilayah yang



memiliki tingkat pendidikan yang cenderung rendah seperti Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Trenggalek ditambah lagi nilai IPM Jawa Timur pada tahun 2018 menempati urutan terendah di Pulau Jawa yakni sebesar 70,77 dimana hal ini mengakibatkan kabupaten-kabupaten tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang cenderung tinggi yang mengakibatkan kurangnya signifikansi pada variabel pendidikan.

Kondisi inklusivitas perekonomian global saat ini cenderung mengalami perlambatan serta ketidakpastian. Hal ini disebabkan oleh kondisi perang dagang antara AS dan China. Dalam forum *Multilateral Meeting On WEF ASEAN Summit 2020* Christine Lagarde selaku presiden bank sentral eropa (ECB) menerangkan bahwa disituasi perekonomian global saat ini menjaga kestabilan harga-harga merupakan hal utama dalam pengendalian ekonomi.

5.2. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Berdasarkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2011 hingga 2018, perekonomian Jawa Timur melambat sebesar 0,13% per tahun. Hal ini sejalan dengan perlambatan perekonomian nasional yang pada periode yang sama melambat sebesar 0,14% per tahun. Maka diperlukan pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan



masyarakat. Serta peningkatan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi produk unggulan, peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan kawasan, penyederhanaan regulasi untuk kemudahan investasi PMA dan PMDN karena diketahui realisasi investasi tertinggi hanya terpusat di wilayah sentra perekonomian dan perindustrian saja seperti Kota Surabaya, Kab. Gresik, dan Kab. Pasuruan .

Peningkatan serta kemudahan akses masyarakat terhadap sumber pendanaan diperlukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, serta pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, peningkatan pengelolaan limbah, pengoptimalan dukungan pendanaan pembangunan melalui kemitraan stakeholder, dan peningkatan konektivitas ekonomi.

Pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Timur adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan maka pemerintah Jawa Timur diharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di 38 Kabupaten/Kota secara merata dimulai dari unit terkecil layanan kesehatan mengingat variabel kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini karena masih ditemukannya kelompok Kabupaten/Kota dengan tingkat kesehatan yang rendah seperti Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan dan Kab. Bondowoso disbanding dengan wilayah lain hal ini dikarenakan masih minimnya layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Penetapan sistem pendidikan yang baku bisa memberikan kepastian bagi setiap pengajar dan sekolah. Kelengkapan fasilitas serta pemerataan kualitas



pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, hal ini harus menjadi fokus Pemerintah Provinsi Jawa Timur dimana banyak masyarakat yang belum memperoleh hak mereka dalam memperoleh pendidikan. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Rata-rata Lama Sekolah di Jawa Timur berada di posisi ke 2 (dua) terendah. Tentunya hal tersebut membutuhkan peningkatan upaya yang intensif.

Perbaikan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Timur dimulai dari peningkatan kualitas tenaga pendidiknya, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi para guru dan kepala sekolah, sehingga mereka mampu menjadi tenaga pendidik yang berkualitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan bagi para siswanya peran guru sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan SDM yang handal tidak hanya sisi akademik namun juga memiliki karakter religius, memegang nilai-nilai budaya dan kearifan local. Maka dari itu peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan pendidikan serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

Anthony Shorrocks and Rolph van der Hoeven. 2004, *Growth, Inequality, and Poverty Economic Policy, Distribution, and Poverty: The Nature of Disagreements*.

Arsyad, L. 2016. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima. STIE YKPN. Yogyakarta.

Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi ke-5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2017. *Angka Harapan Hidup Jawa Timur 2013-2017*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2013. *Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur 2013*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2013. *Konsumsi Kelompok Makanan Menurut Kabupaten/Kota 2013*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2013. *Laju PDRB Menurut Kabupaten/Kota 2013*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2013. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2013*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2013. *Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota 2013*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2014. *Angka Harapan Hidup Jawa Timur 2014*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2014. *Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur 2014*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2014. *Konsumsi Kelompok Makanan Menurut Kabupaten/Kota 2014*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2014. *Laju PDRB Menurut Kabupaten/Kota 2014*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2014. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2014*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2014. *Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota 2014*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2015. *Angka Harapan Hidup Jawa Timur 2015*.



Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2015. Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur 2015.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2015. Konsumsi Kelompok Makanan Menurut Kabupaten/Kota 2015.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2015. Laju PDRB Menurut Kabupaten/Kota 2015.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2015. Provinsi Jawa Timur *Dalam Angka* 2015.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2015. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota 2015.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2016. Angka Harapan Hidup Jawa Timur 2016.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2016. Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur 2016.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2016. Konsumsi Kelompok Makanan Menurut Kabupaten/Kota 2016.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2016. Laju PDRB Menurut Kabupaten/Kota 2016.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2016. Provinsi Jawa Timur *Dalam Angka* 2016

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2016. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota 2016.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2017. Angka Harapan Hidup Jawa Timur 2017.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2017. Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur 2017.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2017. Konsumsi Kelompok Makanan Menurut Kabupaten/Kota 2017.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2017. Laju PDRB Menurut Kabupaten/Kota 2017.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2017. Provinsi Jawa Timur *Dalam Angka* 2017.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2017. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota 2017.



Badan Pusat Statistik. 2018. Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 2018.

Badan Pusat Statistik. 2019. Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi 2007-2019

Badan Pusat Statistik. 2019. Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Provinsi 2007-2019

BPS. 2012. Kemiskinan: Konsep dan Definisi. BPS Jawa Timur

Case dan Fair, 2002. Prinsip-prinsip Ekonomi Makro. Edisi bahasa Indonesia pada Pearson Education Asia Pte.Ltd. dan PT Prenhallindo, Jakarta.

Cholili, Fatkhul Mufid dan M.Pudjihardjo. 2014. Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 2 (1): Semester Ganjil 2013/2014. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeristas Brawijaya.

Dermawan Wibisono, 2005. Metode Penelitian & Analisis Data. Jakarta: Salemba Medika

Finkayana, I Putu Arya dan Made Heny Urmila Dewi. 2016. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Indikator Komposit IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Bali Tahun 2004 – 2013. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 5 (7):861-881. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Udayana.

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Gujarati, D.N.,2012, Dasar-dasar Ekonometrika, Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5, Jakarta

Kuncoro, Mudrajat. 2000, Ekonomi Pembangunan, Teori masalah dan kebijakan, Penerbit UPP AMP YKPN, Jogjakarta

Novitha dan Wirathi, 2015. Pengaruh Investasi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Mediasi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali.

Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rochmin. 2004. Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta: LP3ES.

Rahmawati, Y. I. 2006 Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur [skripsi].Program Studi Pertanian dan Sumberdaya. Fakultas Pertanian, IPB, Bogor.

Ranieri, R. DAN Ramos, R. 2013. *Inclusive Growth: Building Up a Concept. International Policy Centre for Inclusive Growth. Working Paper Number 104. UNDP*



Rasidin, K dan Bonar M Sinaga. 2004. Dampak Investasi, Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium.

Rosyidi, Suherman. 2002. Pengantar Teori Ekonomi. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Sitepu, R. K. & Bonar M. S. 2004. Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia.

Sukirno, Sadono. 2000. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sukirno. 2008. Mikroekonomi: Teori Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Suryawati, Criswardani. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. Semarang; Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.

Tambunan, Tulus. 2001. Perekonomian Indonesia : Teori Dan Temuan Empiris. Cetakan Kedua. Jakarta.

Tarigan, Robinson. 2004. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: PT Bumi Aksara

Todaro, M. P. & Smith, S. C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Ke-9, Jilid Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Todaro, M. P. & Stephen C. S. 2011. Pembangunan Ekonomi. Jilid 1. Edisi 11. Alih Bahasa. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Todaro, M.P. dan Smith Stephen. C. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi kedelapan. Jilid 2. Jakarta: Erlangga

Todaro, Michael P, 2000, Ekonomi pembangunan di Dunia Ketiga, Edisi Ketujuh, Penerbit Erlangga, Jakarta

World Bank. 2000. *Global Poverty Report*.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Data Penelitian

KM	PDRB	KONSUMSI	ln_FDI	ln_DDI	HEL	EDU	YEAR	KABKOTA
16.73611149	5.55	55	6.890303885	0	70.7	6.32	2013	PACITAN
16.17890337	4.95	56	0	14.15346462	70.75	6.43	2014	PACITAN
16.71185838	4.85	52	0	7.410468083	71.05	6.88	2015	PACITAN
15.48595256	4.95	54	3.540959324	10.29363596	71.18	6.89	2016	PACITAN
15.40691161	4.98	56	0	9.072732109	71.31	7.02	2017	PACITAN
15.04821216	4.89	52	0	0	71.85	6.86	2013	PONOROGO
11.5383416	4.95	53	6.745236349	0	71.88	6.91	2014	PONOROGO
11.90002686	4.99	46	6.54534966	0	72.08	6.96	2015	PONOROGO
11.74704828	5.02	48	0	0	72.18	6.97	2016	PONOROGO
11.38414565	5.1	54	0	11.18907168	72.27	7.01	2017	PONOROGO
13.57139828	5.66	53	0	0	72.49	6.74	2013	TRENGGALEK
13.10461413	5.02	52.6	0	0	72.51	6.87	2014	TRENGGALEK
13.37347649	4.79	48.89	0	7.907025939	72.91	7.18	2015	TRENGGALEK
13.23458147	4.76	49.72	0	2.459588842	73.03	7.19	2016	TRENGGALEK
12.95188024	5.02	53	0	11.18907168	73.15	7.20	2017	TRENGGALEK
9.084505717	5.78	47	0	17.36653306	72.86	7.44	2013	TULUNGAGUNG
8.760066695	5.18	48.51	0	7.824046011	72.88	7.45	2014	TULUNGAGUNG
8.555704619	4.75	47.57	0	0	73.28	7.72	2015	TULUNGAGUNG
8.220438339	4.78	48.22	0	8.210151593	73.40	7.73	2016	TULUNGAGUNG
8.032673969	5.08	52	4.075841091	0	73.53	7.82	2017	TULUNGAGUNG
10.58325804	4.81	53	0	0	72.47	6.67	2013	BLITAR
10.22972616	4.78	56	0	0	72.50	6.82	2014	BLITAR
9.963366382	4.82	49	8.407980822	10.85982558	72.80	7.24	2015	BLITAR
9.872924477	4.83	52	7.605193241	0	72.89	7.25	2016	BLITAR
9.788412753	5.07	52	0	12.46792139	72.99	7.26	2017	BLITAR
13.24400328	5.5	52	3.314186005	13.58137241	72.02	7.24	2013	KEDIRI
12.7556242	5.5	51	0	14.0561548	72.04	7.41	2014	KEDIRI
12.88914546	4.66	51	0	10.79957558	72.14	7.41	2015	KEDIRI
12.70148644	4.78	49	0	13.75762368	72.20	7.58	2016	KEDIRI
12.23779807	4.9	54	8.530701541	12.88588658	72.25	7.65	2017	KEDIRI
11.50397537	5.03	47	6.251518452	13.60811781	71.76	6.59	2013	MALANG
11.09182232	5.67	52	10.08426208	13.79217212	71.78	6.66	2014	MALANG
11.51076026	5	46	8.071811928	13.20700944	71.98	6.73	2015	MALANG
11.47119412	5.03	45	10.24545538	14.67791423	72.05	6.98	2016	MALANG
11.0207421	5.43	55	10.53683961	14.55733037	72.12	7.17	2017	MALANG
12.15059708	5.29	60	7.279318835	8.297817533	69.02	5.88	2013	LUMAJANG



11.7598	5.05	62	6.214608098	0	69.07	6.03	2014	LUMAJANG
11.5036697	4.42	57	5.583120298	0	69.27	6.04	2015	LUMAJANG
11.21313962	4.49	58	2.995732274	0	69.38	6.05	2016	LUMAJANG
10.86492101	5.05	58	8.004532552	0	69.50	6.20	2017	LUMAJANG
11.69480138	5.71	58	10.41446816	11.00209984	67.75	5.62	2013	JEMBER
11.29203611	5.84	58	7.585484207	0	67.80	5.63	2014	JEMBER
11.19763701	5.09	54	7.327714833	0	68.20	5.76	2015	JEMBER
10.959074	4.97	57	9.072778009	9.721365976	68.37	6.05	2016	JEMBER
10.98270296	5.11	58	8.363762253	7.759400817	68.54	6.06	2017	JEMBER
9.617170884	6.29	52	8.331176817	11.44549209	69.88	6.84	2013	BANYWANGI
9.300527303	5.41	53	0	14.70620722	69.93	6.87	2014	BANYWANGI
9.158870649	5.67	50	9.072778009	13.45339427	70.03	6.88	2015	BANYWANGI
8.779162039	5.1	54	8.602471401	14.64350628	70.11	6.93	2016	BANYWANGI
8.632329676	5.45	51	7.959101242	13.91065354	70.19	7.11	2017	BANYWANGI
15.31633614	5.49	61	0	0	65.36	5.48	2013	BONDOWOSO
14.78224915	4.81	61	0	0	65.43	5.52	2014	BONDOWOSO
14.93947097	4.72	55	6.154433375	0	65.73	5.53	2015	BONDOWOSO
14.98247274	4.74	58	7.673734618	0	65.89	5.54	2016	BONDOWOSO
14.52181784	5.03	58	7.364166955	0	66.04	5.55	2017	BONDOWOSO
13.66728116	5.83	58	4.025351691	9.72862213	68.03	5.28	2013	SITUBONDO
13.16791114	5.47	58	0	5.298317367	68.08	5.54	2014	SITUBONDO
13.61329405	4.64	59	7.350002231	0	68.28	5.67	2015	SITUBONDO
13.31982735	4.76	59	7.868636894	12.74886282	68.41	5.68	2016	SITUBONDO
13.03821617	5.07	57	7.690697459	0	68.53	6.03	2017	SITUBONDO
21.25170494	4.9	52	14.22386376	10.52402909	65.69	5.61	2013	PROBOLINGGO
20.47338636	4.67	54	8.808847365	0	65.75	5.64	2014	PROBOLINGGO
20.77721661	4.54	52	14.12774118	0	66.15	5.66	2015	PROBOLINGGO
20.94664516	4.55	57	12.61915666	9.888373915	66.31	5.67	2016	PROBOLINGGO
20.49144141	4.46	55	9.297380082	0	66.47	5.68	2017	PROBOLINGGO
11.28661646	6.5	58	12.83363943	15.52724058	69.80	6.08	2013	PASURUAN
10.87602668	6.32	57	11.31740438	15.44337547	69.83	6.36	2014	PASURUAN
10.69613039	5.11	53	11.24149987	15.43887816	69.83	6.50	2015	PASURUAN
10.5453845	5.16	52	12.88230635	14.64012332	69.86	6.58	2016	PASURUAN
10.31827557	5.72	55	12.56278754	16.41982066	69.90	6.82	2017	PASURUAN
6.744799623	6.45	49	11.97281626	15.86537001	73.43	10.03	2013	SIDOARJO
6.420579637	6.05	51	11.86082643	13.34053539	73.43	10.09	2014	SIDOARJO
6.42947859	4.98	44	11.29811956	15.40984683	73.63	10.10	2015	SIDOARJO
6.360899556	5.22	44	12.28200445	15.06974627	73.67	10.22	2016	SIDOARJO
6.201452409	5.8	46	12.044535	15.38917564	73.71	10.23	2017	SIDOARJO
11.02279431	6.16	56	12.49738238	13.40219149	71.75	7.57	2013	MOJOKERTO
10.58397774	6.06	56	12.79308901	15.33062768	71.76	7.74	2014	MOJOKERTO



10.53879667	5.34	50	12.05414973	14.86227533	71.96	7.75	2015	MOJOKERTO
10.5845928	5.2	55	11.9318884	14.52222173	72.03	7.76	2016	MOJOKERTO
10.16731181	5.74	52	11.74219978	14.41375023	72.10	8.15	2017	MOJOKERTO
11.17086055	5.6	56	10.743314	11.51292546	71.34	7.40	2013	JOMBANG
10.81408602	5.41	51	9.763535592	10.09579244	71.37	7.52	2014	JOMBANG
10.77772898	5.08	52	8.16885483	10.23275533	71.67	7.59	2015	JOMBANG
10.68866186	5.12	55	9.701151026	12.9944841	71.77	7.68	2016	JOMBANG
10.467026	5.36	54	11.54508283	0	71.87	8.06	2017	JOMBANG
13.62233056	5.12	53	8.158802491	11.42381443	70.83	7.15	2013	NGANJUK
13.15379923	5.86	56	0	0	70.87	7.31	2014	NGANJUK
12.6752397	4.92	52	9.437507817	7.164875046	70.97	7.33	2015	NGANJUK
12.23484396	5.2	53	0	12.79547495	71.04	7.34	2016	NGANJUK
11.9679748	5.26	56	7.710429284	9.885374497	71.11	7.38	2017	NGANJUK
12.45752609	5.37	54	0	0	69.70	6.74	2013	MADIUN
12.04769224	5.07	57	0	11.20930505	69.76	6.89	2014	MADIUN
12.53388987	5	49	8.305558162	10.85177295	70.36	6.99	2015	MADIUN
12.68007192	5.01	51	6.656469422	13.68414767	70.55	7	2016	MADIUN
12.27113878	5.42	53	6.214608098	14.68142614	70.77	7.30	2017	MADIUN
12.19428387	5.53	50	2.302585093	0	71.87	7.43	2013	MAGETAN
11.80950314	4.85	50	0	0	71.91	7.55	2014	MAGETAN
11.34181153	4.92	48	0	0	72.01	7.65	2015	MAGETAN
11.02575862	5.04	48	0	11.0990753	72.09	7.66	2016	MAGETAN
10.47869184	5.09	47	0	13.00549962	72.16	7.94	2017	MAGETAN
15.46228597	5.21	53	8.801920904	0	71.28	6.27	2013	NGAWI
14.88230057	5.5	48	6.153158136	8.832003931	71.33	6.52	2014	NGAWI
15.60360191	4.83	52	8.731626922	11.8947889	71.53	6.53	2015	NGAWI
15.26860202	4.95	55	6.519884479	13.81556516	71.63	6.54	2016	NGAWI
14.91265805	5.07	49	9.082847851	13.99040351	71.74	6.66	2017	NGAWI
16.02992252	2.31	52	7.073862762	13.97079343	70.07	5.90	2013	BOJONEGORO
15.49027659	2.24	48	7.495541944	0	70.11	6.14	2014	BOJONEGORO
15.68727979	14.84	46	3.401197382	2.564949357	70.51	6.64	2015	BOJONEGORO
14.59146086	18	44	8.505039635	0	70.67	6.65	2016	BOJONEGORO
14.32986094	10.26	59	6.845773487	10.30895266	70.83	6.71	2017	BOJONEGORO
17.2492788	5.53	57	9.122394013	16.0490056	70.22	6.14	2013	TUBAN
16.65944554	5.18	5	11.29366437	15.20140486	70.25	6.18	2014	TUBAN
17.05156061	4.66	5	7.758077134	10.98430919	70.55	6.20	2015	TUBAN
17.12313985	4.67	5	8.815429373	13.18301228	70.67	6.25	2016	TUBAN
16.85266764	5	60	7.428570837	14.36831313	70.80	6.48	2017	TUBAN
16.18365754	6.48	50	10.13122852	12.82246809	71.43	7.06	2013	LAMONGAN
15.67707087	5.93	50.5	12.97135722	10.82297318	71.47	7.27	2014	LAMONGAN
15.37639071	5.45	46.89	0	13.31765644	71.67	7.28	2015	LAMONGAN



14.80567551	5.53	50.59	0	12.89491507	71.77	7.29	2016	LAMONGAN
14.42012389	5.52	51	9.700220155	13.08767545	71.87	7.54	2017	LAMONGAN
13.98417897	5.7	47	13.64442599	15.38302566	72.19	8.41	2013	GRESIK
13.44219173	6.58	49.69	12.66527597	16.29946012	72.20	8.42	2014	GRESIK
14.62846726	6.2	45.98	11.76505989	15.81748349	72.30	8.93	2015	GRESIK
13.15178539	5.21	50.99	12.95021921	16.63574337	72.33	8.94	2016	GRESIK
12.76869273	5.83	52	13.06456709	16.03099634	72.36	8.95	2017	GRESIK
23.28540785	0.19	63	3.401197382	6.214608098	69.60	4.90	2013	BANGKALAN
22.43553484	0.71	56.06	0	13.5340748	69.62	5.07	2014	BANGKALAN
22.65837442	-2.73	57.47	0	0	69.72	5.08	2015	BANGKALAN
21.36640724	0.66	59.56	7.13089883	8.701346403	69.77	5.13	2016	BANGKALAN
21.27214711	3.53	65	6.734472747	8.15378132	69.82	5.14	2017	BANGKALAN
27.17025415	6.13	62	0	0	67.46	3.34	2013	SAMPANG
25.87721714	0.08	58.14	3.015534901	0	67.48	3.49	2014	SAMPANG
25.65646279	2.03	55.53	9.580496041	7.824046011	67.58	3.65	2015	SAMPANG
24.03932403	5.81	58.17	0	11.7922792	67.62	3.79	2016	SAMPANG
23.49798869	4.69	62	0	7.799753318	67.67	4.12	2017	SAMPANG
18.57610583	5.75	60	0	0	66.53	5.68	2013	PAMEKASAN
17.79427522	5.32	55.6	0	0	66.56	5.72	2014	PAMEKASAN
17.38052369	5.05	55.26	0	0	66.86	5.73	2015	PAMEKASAN
16.6613205	5.08	55.56	2.48490665	0	66.95	6.08	2016	PAMEKASAN
15.9640048	5.04	62	2.708050201	0	67.05	6.25	2017	PAMEKASAN
21.24930857	12.63	61	0	0	69.98	4.58	2013	SUMENEP
20.51158075	5.86	60.42	12.64293693	0	70.02	4.77	2014	SUMENEP
20.22547996	1.26	54.27	11.4661577	0	70.42	4.89	2015	SUMENEP
20.07234365	2.51	57.23	0	0	70.56	5.08	2016	SUMENEP
19.60037144	2.86	64	7.915056049	7.669261797	70.71	5.22	2017	SUMENEP
8.242383929	3.4	47	0	0	73.51	9.57	2013	KT KEDIRI
7.947581921	5.52	44.87	0	0	73.52	9.70	2014	KT KEDIRI
8.489164441	5.09	37.73	5.915932484	0	73.62	9.88	2015	KT KEDIRI
8.383632766	5.25	42.78	4.978112102	9.51929458	73.65	9.89	2016	KT KEDIRI
8.475292428	5.14	45	6.813884063	9.350102314	73.69	9.90	2017	KT KEDIRI
7.442779031	6.1	44	0	0	72.69	9.53	2013	KT BLITAR
7.158352994	5.56	41.95	0	0	72.70	9.81	2014	KT BLITAR
7.280215796	5.38	40.19	0	0	73	9.87	2015	KT BLITAR
7.166629528	5.45	40.99	0	0	73.09	9.88	2016	KT BLITAR
7.121682917	5.78	46	4.21508618	0	73.17	9.89	2017	KT BLITAR
4.876290879	5.84	42	7.090076836	0	72.28	9.82	2013	KT MALANG
4.79920754	5.48	38.09	1.808288771	7.932433939	72.30	9.97	2014	KT MALANG
4.59298624	5.31	39.21	7.773678603	4.471638793	72.60	10.13	2015	KT MALANG
4.32386357	5.31	38.63	9.131524412	10.90645861	72.68	10.14	2016	KT MALANG



4.165244586	5.69	38	8.962225107	11.8083361	72.77	10.15	2017	KT MALANG
8.575984563	6.08	44	0	0	69.50	8.42	2013	KT PROBOLINGGO
8.378274693	5.6	38.02	4.865224091	10.14865479	69.52	8.44	2014	KT PROBOLINGGO
8.148009065	5.53	40.94	7.747380926	9.362202721	69.72	8.46	2015	KT PROBOLINGGO
7.948527121	5.55	44.97	10.04072893	8.902455592	69.79	8.47	2016	KT PROBOLINGGO
7.81990623	5.88	41	4.966335035	9.686282583	69.86	8.48	2017	KT PROBOLINGGO
7.592895962	6.12	50	0.955511445	6.372978434	70.52	9.03	2013	KT PASURUAN
7.344992215	5.4	52.1	6.109247583	10.01718224	70.54	9.06	2014	KT PASURUAN
7.453224854	5.24	42.57	0	9.385175643	70.84	9.07	2015	KT PASURUAN
7.60950449	5.18	43.83	4.910446567	9.15845743	70.93	9.08	2016	KT PASURUAN
7.511532859	5.47	53	10.02631562	12.36919439	71.02	9.09	2017	KT PASURUAN
6.704036961	5.84	49	7.184553335	0	72.37	9.91	2013	KT MOJOKERTO
6.414419615	5.51	46.63	0	9.143516575	72.39	9.91	2014	KT MOJOKERTO
6.141313859	5.43	39.66	7.963981851	0	72.69	9.92	2015	KT MOJOKERTO
5.727666846	5.46	41.69	9.162672078	0	72.78	9.93	2016	KT MOJOKERTO
5.7197181	5.65	45	4.792479284	9.606327371	72.86	9.98	2017	KT MOJOKERTO
4.996726283	7.13	40	0	13.79754952	72.38	10.86	2013	KT MADIUN
4.874607881	6.21	43.97	5.654942309	0	72.41	10.90	2014	KT MADIUN
4.885853882	5.8	35.66	0	3.091042453	72.41	11.08	2015	KT MADIUN
5.153553104	5.58	38.15	5.165928179	7.932541607	72.44	11.09	2016	KT MADIUN
4.940402842	5.93	43	7.726344975	0	72.48	11.10	2017	KT MADIUN
6.002985901	7.05	42	11.63981711	14.61587794	73.83	10.05	2013	KT SURABAYA
5.801143573	6.5	36.82	10.24151572	15.38822799	73.85	10.07	2014	KT SURABAYA
5.817629327	5.63	33.75	12.91061664	16.37865694	73.85	10.24	2015	KT SURABAYA
5.624988209	5.66	39.94	12.67782475	16.28410022	73.87	10.44	2016	KT SURABAYA
5.38178084	6.13	40	12.52143542	15.42361252	73.88	10.45	2017	KT SURABAYA
4.791298187	6.8	48	0	0	72.05	8.34	2013	KT BATU
4.581889954	6.46	46.72	0	0	72.06	8.41	2014	KT BATU
4.703593785	6.27	39.98	0	0	72.16	8.44	2015	KT BATU
4.473134011	6.2	45.03	0	9.757305042	72.20	8.45	2016	KT BATU
4.29908283	6.56	50	3.417726684	8.732772204	72.25	8.46	2017	KT BATU



Lampiran: Common Effect Model

```
. reg POVP GDPP C ln_FDI ln_DDI HEL1 EDU1
```

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	190
Model	2309.76425	6	384.960708	F(6, 183)	=	30.79
Residual	2287.8878	183	12.5021191	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.5024
				Adj R-squared	=	0.4861
Total	4597.65204	189	24.3262013	Root MSE	=	3.5358

POVP	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
GDPP	-.3676657	.1283413	-2.86	0.005	-.6208847 -.1144467
C	.0908884	.0236277	3.85	0.000	.0442706 .1375062
ln_FDI	-.0885534	.062554	-1.42	0.159	-.2119732 .0348663
ln_DDI	.0235178	.0468751	0.50	0.616	-.0689674 .1160029
HEL1	-.0534058	.0061433	-8.69	0.000	-.0655266 -.0412849
EDU1	-.0170304	.0061149	-2.79	0.006	-.0290951 -.0049657
_cons	15.88908	1.654778	9.60	0.000	12.62418 19.15397

Lampiran: Fixed Effect Model

```
. xtreg POVP GDPP C ln_FDI ln_DDI HEL1 EDU1, fe
```

Fixed-effects (within) regression				Number of obs	=	190
Group variable: KABKOTA1				Number of groups	=	38
R-sq:				Obs per group:		
within = 0.2763				min =		5
between = 0.4014				avg =		5.0
overall = 0.3996				max =		5
corr(u_i, Xb) = 0.2340				F(6,146)	=	9.29
				Prob > F	=	0.0000

POVP	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
GDPP	-.0261621	.0228064	-0.27	0.031	-.0512355 -.0389113
C	-.0102842	.0065874	-1.56	0.121	-.0233032 .0027348
ln_FDI	-.001021	.0133056	-0.08	0.939	-.0273174 .0252754
ln_DDI	-.0044134	.0095982	-0.46	0.646	-.0233827 .0145559
HEL1	-.0461986	.0072954	-6.33	0.000	-.0606169 -.0317803
EDU1	-.0035081	.0026824	-1.31	0.193	-.0088095 .0017933
_cons	16.87304	.69907	24.14	0.000	15.49144 18.25464

sigma_u	3.9480039
sigma_e	.48662798
rho	.98503453 (fraction of variance due to u_i)

F test that all u_i=0: F(37, 146) = 257.17

Prob > F = 0.0000



Lampiran: Random Effect Model

```
. xtreg POVP GDP C ln_FDI ln_DDI HEL1 EDU1, re
```

Random-effects GLS regression
Group variable: KABKOTA1

R-sq:
within = 0.2753
between = 0.4064
overall = 0.4045

Number of obs = 190
Number of groups = 38

Obs per group:
min = 5
avg = 5.0
max = 5

corr(u_i, X) = 0 (assumed)

Wald chi2(6) = 79.21
Prob > chi2 = 0.0000

	POVP	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
	GDP	-.0090516	.0231775	-0.39	0.696	-.0544787 .0363755
	C	-.008535	.0066644	-1.28	0.200	-.021597 .0045269
	ln_FDI	.000018	.0134138	0.00	0.999	-.0262725 .0263085
	ln_DDI	-.0032464	.0096574	-0.34	0.737	-.0221745 .0156817
	HEL1	-.0506406	.0064745	-7.82	0.000	-.0633304 -.0379508
	EDU1	-.0040914	.0026831	-1.52	0.127	-.0093501 .0011674
	_cons	17.21473	.8808694	19.54	0.000	15.48826 18.94121
	sigma_u	3.6022682				
	sigma_e	.48662798				
	rho	.98207794	(fraction of variance due to u_i)			

Lampiran: Uji Hausman

```
hausman fe re
```

	Coefficients			
	(b) fe	(B) re	(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E.
GDP	-.0061621	-.0090516	.0028895	.
C	-.0102842	-.008535	-.0017492	.
ln_FDI	-.001021	.000018	-.001039	.
ln_DDI	-.0044134	-.0032464	-.001167	.
HEL1	-.0461986	-.0506406	.004442	.0033621
EDU1	-.0035081	-.0040914	.0005832	.

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(6) = ((V_b-V_B)^(-1)) (b-B)
= 504.17
Prob>chi2 = 0.0000
(V_b-V_B is not positive definite)